

# LAPORAN PEMETAAN PROGRAM PENCEGAHAN EKSTREMISME-KEKERASAN

Oleh Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah  
di Indonesia (2014-2019)





# **LAPORAN PEMETAAN PROGRAM PENCEGAHAN EKSTREMISME-KEKERASAN**

Oleh Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah  
di Indonesia (2014-2019)

MEI - 2020

# Laporan Pemetaan Program Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan

Oleh Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Indonesia (2014-2019)

## Tim Penyusun

Dr. Mirra Noor Milla  
Chandra Rila Putra  
Sugeng Bahagijo  
Lola Loveita  
Aditiana Dewi Eridani

## Penyunting

Kiswondo

## Desain & Tata Letak

Galih Gerryaldy

ISBN 978-979-8811-16-6



**Hal:** 116 Halaman + Cover

**Ukuran:** 114mm X 210mm

**Terbitan pertama Mei 2020.**

Diterbitkan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

## INFID

Jl. Jatipadang Raya, Kav. 3 No. 105, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan, 12540, Indonesia  
T: +6221-7819734 / Fax: +6221-78844703  
[www.infid.org](http://www.infid.org)

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	6
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	<b>9</b>
A. Perspektif Teoritis Ekstremisme-Kekerasan	9
B. Relevansi	13
<b>BAB III METODOLOGI</b>	<b>17</b>
A. Desain Penelitian	17
B. Metode Pengumpulan Data	18
C. Analisis Data	21
<b>BAB IV HASIL PEMETAAN PROGRAM</b>	<b>31</b>
a. Klasifikasi Program berdasarkan Bidang dan Fokus Program	31
b. Klasifikasi dan Pemetaan Program berdasarkan Kerangka 4 Pilar RAN PE	34
c. Persepsi dan Sikap terhadap Program PVE dari Kelompok Target	51
d. Implementasi, Hambatan, dan Kendala Pelaksanaan Program Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan	59
e. Kebijakan dan Program Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan dalam Konteks Demokrasi di Indonesia	70
f. Ekstrapolasi Model Analisis Kebijakan	80
<b>BAB V SARAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>83</b>
<b>BAB VI KETERBATASAN PENELITIAN</b>	<b>90</b>
DAFTAR PUSTAKA	92
Glossary	94

# Kata Pengantar

Selama 5 tahun terakhir, INFID telah berkontribusi untuk memperkuat kebijakan pencegahan ekstremisme-kekerasan dan pencegahan terorisme. Antara lain dengan menyediakan bukti-bukti yang dihasilkan dari kerja-kerja penelitian yang dapat digunakan pengambil kebijakan dan pihak lain untuk mencegah dan mengurangi penyebaran paham ekstrem dan kekerasan.

Pada tahun ini, INFID telah menghasilkan satu lagi hasil penelitian berjudul *“Pemetaan Kebijakan dan Program Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan oleh Pemerintah dan Masyarakat di Indonesia (2014-2019)”* Penelitian ini dikerjakan selama enam bulan, sejak bulan Desember 2019 sampai Mei 2020.

Dengan menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) peneliti INFID telah mengumpulkan bukti-bukti dan memetakan ragam kerja-kerja yang telah dilakukan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat sipil, khususnya dalam bidang Pendidikan, Media Sosial dan Deradikalisasi.

Laporan akhir penelitian telah melalui dua kali *peer review* termasuk dengan kalangan akademisi, praktisi dan pengambil kebijakan. Penelitian hendak mengisi *gap* pengetahuan untuk dapat diadopsi oleh berbagai kalangan, baik untuk tujuan menghasilkan pengetahuan baru maupun untuk pemecahan masalah.

Temuannya antara lain : (a) Terdapat 24 aktor yang berkontribusi dalam pelaksanaan program di bidang Pendidikan, 20 aktor di bidang Internet dan Media Sosial, 10 aktor di bidang Deradikalisasi, 15 aktor di bidang Kebijakan, dan 18 aktor di bidang lainnya (Sosiokultural, politik); para aktor telah melaksanakan 49 program dalam bidang Pendidikan, 22 program di bidang Internet dan Media Sosial, 14 di bidang Deradikalisasi, 28 di bidang Kebijakan, dan 31 di bidang lainnya.

Temuan yang juga penting adalah, (i) Masih terdapat batasan dan kendala dalam pelaksanaan program, seperti: (a) Keterbatasan cakupan intervensi; (b) Program pencegahan yang bersifat umum dan kurang fokus pada

kategori sasaran maupun jenis intervensi; (c) Lemahnya kerja sama antar pihak dalam pelaksanaan PVE di Indonesia.

Beberapa rekomendasinya antara lain, (i) Melakukan evaluasi konten di bidang Internet dan Media Sosial dengan menggunakan indikator yang jelas (misalnya peningkatan *traffic*). Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun tema kontra-narasi yang sinergis antar aktor; (ii) Melakukan identifikasi terhadap faktor penarik radikalisisasi seperti kerentanan sosial, politik, dan ekonomi serta faktor pendorong seperti motivasi identitas dan peran kebermaknaan melalui penelitian pendahuluan dan; (iii) Meningkatkan kerja sama antar-aktor dan akademisi.

Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan oleh pemerintah dan berbagai pihak untuk merancang program-program pencegahan yang lebih sesuai dan lebih efektif serta menyusun bentuk-bentuk intervensi dalam skala yang lebih sesuai dengan keadaan di lapangan.

Penelitian ini tidak mungkin tanpa kerja tekun, komitmen dan kreativitas dari Tim Peneliti yang terdiri dari Dr. Milla Noor Mila dan Chandra Rila Putra dari Lab Psikologi, Fakultas Psikologi UI. Kami menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Pemerintah Indonesia sebagai bagian dan anggota PBB yang telah dan sedang menyusun Rencana Aksi Pencegahan Ekstremisme diharapkan dapat memetik manfaat dari penelitian ini. Laporan penelitian INFID ini dapat menjadi masukan dan tambahan cakupan tentang prioritas tindakan dan kegiatan-kegiatan di masa depan.

Jakarta. 06 Juli 2020

**Sugeng Bahagijo**

Direktur Eksekutif

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Program pencegahan ekstremisme-kekerasan telah menjadi salah satu program utama dalam bidang keamanan, hukum, dan politik di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tantangan yang tengah dihadapi Indonesia hari ini, yaitu penyebaran ideologi radikal dan terorisme yang masih terus terjadi. Bahkan, tantangan ini semakin menguat –seiring dengan suhu politik yang beberapa kali memanas, dan rentan terjadi perpecahan antara kelompok, polarisasi, dan intoleransi. Guna mengatasi ancaman tersebut, pemerintah telah menerapkan kebijakan sosial berdasarkan pilar Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Terorisme (lazim disebut sebagai RAN PE) dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah.

Studi ini merupakan studi deskriptif, yang menggambarkan pemetaan program-program *Preventing Violent Extremism* (kemudian akan sering disebut: PVE) di Indonesia saat ini. Pada tahap pertama dilakukan studi kualitatif dengan menggunakan metode studi dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan cara penelusuran *online* terhadap program-program PVE, yang telah dijalankan para aktor. Sementara itu, FGD dilaksanakan bersama dengan 15 aktor, yang sudah mewakili empat bidang utama, yang diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu: bidang pendidikan, internet dan media sosial, deradikalisasi, dan kebijakan. Selain itu, juga dilakukan survei dan wawancara terstruktur terhadap 22 aktor, untuk memperoleh pendalaman data mengenai

kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program PVE, peluang pengembangan program, serta rekomendasi untuk peningkatan sinergisitas antar pihak dalam melaksanakan PVE. Secara keseluruhan, terdapat 52 aktor dan 144 program yang berhasil diidentifikasi dalam studi ini.

### **Temuan yang diperoleh dari riset ini mencakup:**

1. Secara berturut-turut kecenderungan dari 52 aktor memperlihatkan dalam lintas bidang ataupun hanya pada satu bidang, sebagian besar sebanyak 24 aktor telah berkontribusi dalam pelaksanaan program di bidang pendidikan; *kedua* diikuti oleh 20 aktor berkontribusi pada program di bidang internet dan media sosial; *ketiga* sebanyak 18 aktor menerapkan program di bidang lainnya (ekonomi – sosiokultural – politik); *keempat* sebanyak 15 aktor di bidang kebijakan; dan *keempat* atau paling sedikit hanya terdapat 10 aktor yang langsung menysasar di bidang deradikalisasi;
2. Kecenderungan program dari para aktor memperlihatkan bahwa paling banyak (34%) atau 49 program berfokus intervensinya di bidang pendidikan; *kedua* sebesar 31 program (21,5%) berfokus pada bidang lainnya (ekonomi – sosiokultural – politik); *ketiga* sebesar 28 program (19,4%) di bidang kebijakan; *keempat* sebesar 22 program (15,2%) menysasar pada bidang internet dan media sosial; dan *kelima* atau yang paling sedikit sebanyak 14 program (9,7%) menysasar secara langsung di bidang deradikalisasi;

3. 144 program – yang telah dilaksanakan oleh masyarakat sipil – telah memenuhi keempat pilar RAN PE, yaitu: pencegahan, deradikalisasi, penegakan hukum dan kemitraan kerjasama internasional.
4. Setelah dilakukan tabulasi silang dengan pilar-pilar RAN PE, ditemukan bahwa bidang yang terlihat sudah cukup mendapat perhatian adalah bidang pendidikan dan kebijakan.
5. Sementara itu, bidang yang masih kurang mendapat perhatian adalah: bidang deradikalisasi dan internet dan media sosial.
6. Hampir seluruh program di bidang pendidikan didominasi oleh pilar pertama pada RAN PE, yaitu terkait pencegahan dan kontra radikalasi.
7. Sebagian besar program yang dilakukan dalam pilar pencegahan berada pada fokus ke-3, yaitu: efektivitas kampanye pencegahan di kalangan kelompok rentan (kontra radikalasi) dan fokus ke-4 yaitu penguatan daya tahan kelompok rentan (kontra radikalasi). Adapun kelompok rentan yang secara spesifik telah dijadikan sasaran program adalah remaja dan perempuan.
8. Di dalam bidang internet dan media sosial, fokus paling banyak terdapat di kampanye pencegahan (kontra radikalasi). Lembaga internasional juga berperan dalam bidang ini dalam pilar ke-3 yaitu kerangka hukum dan penguatan legislasi seperti Twitter, Facebook dan Google.

9. Di bidang deradikalisasi, fokus terbanyak adalah di dalam upaya *disengagement* di luar lapas, sementara itu peningkatan kapasitas institusi, riset dan deradikalisasi di dalam lapas masih jauh lebih sedikit jumlahnya.
10. Di dalam bidang kebijakan, fokus paling banyak adalah di dalam evaluasi dan rancangan undang-undang. Sementara itu riset mengenai kebijakan dan mekanisme monitoring dan evaluasi belum banyak menjadi perhatian.
11. Di dalam bidang ekonomi – sosial – politik, terdapat banyak aktor yang melakukan program bervariasi seperti penguatan kapasitas perempuan sebagai agen perdamaian, pemberdayaan komunitas di tingkat desa untuk meningkatkan resiliensi dan program deteksi dini berbasis data.
12. Berdasarkan pengukuran terhadap 31 narasumber dari 13 LP, ada lebih banyak yang memiliki sikap positif terhadap program deradikalisasi dengan persentase mencapai 52%. Meski demikian ada 3% narasumber yang memiliki sikap negatif.
13. 31 narasumber juga menunjukkan sikap positif untuk variabel-variabel yang menjadi indikator keberhasilan deradikalisasi.
14. Berdasarkan pengukuran kepada masyarakat umum di wilayah sasaran Program Sinergisitas 36 Kementerian/Lembaga, baik yang terpapar (254 responden) maupun tidak terpapar (353 responden), ditemukan bahwa kedua kelompok memiliki kepuasan yang sama, yaitu di poin 4 dalam skala 1 hingga 7.

15. Perbedaan yang cukup signifikan kepada 2 kelompok adalah kepuasan pada kinerja Gubernur. Mereka yang terpapar ideologi radikal merasa lebih puas dengan kinerja Gubernur (4.59) dibandingkan yang tidak terpapar (4.27). Dapat dilihat bahwa program ini secara khusus memberikan dampak yang lebih kuat pada kelompok terpapar.

### **Kendala yang ditemukan oleh para aktor:**

1. Di bidang Pendidikan, sensitivitas isu mempersulit dukungan pelaksanaan program PVE.
2. Di bidang internet dan media sosial, pengukuran keberhasilan narasi kontra belum dilakukan secara memadai. Di samping itu bidang ini membutuhkan SDM dengan kapabilitas teknis yang tinggi dan biaya yang mahal.
3. Di bidang deradikalisasi, terdapat resistensi dari individu yang menjadi target program dan sulitnya mengakses individu atau kelompok yang terpapar atau pernah terpapar.
4. Di bidang kebijakan, singkatnya periode masa jabatan dan mutasi jabatan mempersulit proses advokasi atau tindak lanjut dari advokasi. Di samping itu definisi yang tidak sinkron juga menjadi kendala dalam menyusun indikator dan evaluasi dampak program.
5. Kurangnya sinergi antar-aktor juga menyebabkan tumpang tindih program yang dijalankan.
6. Tindak lanjut dari pemerintah juga minim dijelaskan dan diinformasikan.

Berdasarkan temuan dari hasil riset ini, maka beberapa **saran dan rekomendasi** yang dapat diajukan antara lain:

## 1. Pihak Pemerintah

- a. Menyamakan definisi mengenai beberapa terminologi kunci dalam isu PVE.
- b. Menyediakan laporan berkala yang dapat diakses oleh CSO mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan, program yang telah dijalankan, serta arahan yang diharapkan di masa depan.
- c. Membuka akses pendanaan yang berkelanjutan dan informasi mengenai pendanaan kepada CSO.
- d. Mengorganisasikan sebuah forum atau pertemuan terbuka bagi seluruh pembuat kebijakan dan CSO di Indonesia secara berkala.

## 2. Pihak CSO

- a. Menentukan fokus unggulan dalam menangani isu PVE.
- b. Membuka forum diskusi berkala antar CSO sebagai ruang untuk bertukar dan memutakhirkan informasi mengenai program yang sedang dijalankan, serta ruang berbagi dan belajar
- c. Menginisiasi inovasi *database* CSO di Indonesia beserta fokus dan program-programnya.
- d. Memperkuat konsep dan teori mengenai PVE karena sensitivitas isu, argumen yang kedap dan koheren sangat dibutuhkan untuk meyakinkan publik dan pemerintah.

## 3. Program PVE Bidang Pendidikan

- a. Melakukan *joint program* antar-aktor.
- b. Mendorong Kemendikbud, Kemendagri dan Kemenristekdikti untuk mempermudah izin pelaksanaan program PVE khususnya di lembaga-lembaga Pendidikan.

#### **4. Program PVE Bidang Internet dan Media Sosial**

- a. Menyelaraskan kontra narasi sehingga lebih koheren dan terstruktur.
- b. Mengidentifikasi target program dan melakukan pemetaan terhadap kanal-kanal media, yang dapat digunakan untuk mencapai target program tertentu.
- c. Mendorong pemerintah dan lembaga untuk memberikan akses kepada pendanaan yang berkelanjutan.

#### **5. Program PVE Bidang Deradikalisasi**

- a. Mendorong BNPT untuk mempermudah akses terhadap kelompok-kelompok ekstremis kekerasan dan memberi dukungan keamanan kepada para aktor CSO untuk menjalankan program.
- b. Menyusun strategi bersama untuk membuat program-program deradikalisasi yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

#### **6. Program PVE Bidang Kebijakan**

- a. Membuat forum diskusi kebijakan berkala.
- b. Mendorong pemerintah untuk menyusun payung hukum yang memuat seluruh terminologi-terminologi terkait PVE.

#### **7. Program PVE Bidang Ekonomi – Sosiokultural - Politik**

- a. Melakukan identifikasi terhadap faktor penarik seperti kerentanan sosial, politik, dan ekonomi serta faktor pendorong seperti motivasi identitas dan peran kebermaknaan, baik pada masyarakat umum maupun pada kelompok terpapar.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aksi-aksi terorisme dan ekstremisme-kekerasan di Indonesia terus mengalami evolusi, setidaknya semenjak era Orde Baru, sampai dengan hari ini. Beberapa ahli membagi perkembangan terorisme dan ekstremisme-kekerasan berdasarkan periode: Orde Baru dan Reformasi, atau berdasarkan aktor pelaku: *Al-Qaeda* dan ISIS. Keduanya memiliki perbedaan karakteristik yang signifikan. Pada masa Orde Baru, *push factors* menjadi sebab yang kuat. Rezim otoriter mendorong para jihadis dilatih di Afghanistan dan kembali untuk melawan negara.

Definisi populer dari ekstremisme-kekerasan menjelaskan dua hal: Pertama, bahwa ekstremisme-kekerasan terkait dengan penyimpangan dari norma perilaku, di mana seorang individu dapat dianggap sebagai ekstremis, jika dia memegang opini politik yang menyimpang dari yang dipegang oleh mayoritas, atau yang dianggap normatif (Kruglanski & Orehek, 2012). Kedua, diartikan sebagai gairah (*passion*), intensitas, atau polaritas sikap (Kruglanski, Webber, Jasko, Chernikova, & Molinario, 2018). Dalam hal ini ekstremisme-kekerasan dapat dijelaskan sebagai keteguhan keyakinan, kesediaan untuk mempertahankan suatu posisi, ketegasan pendapat, dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Fenomena baru ekstremisme-kekerasan yang dijalankan *Islamic State of Iraq and Suriah ISIS* tidak hanya mengubah lanskap terorisme di Indonesia, tetapi juga berdampak besar terhadap konstelasi terorisme di berbagai negara di dunia. Munculnya ISIS sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari organisasi Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Nama Al Qaeda sangat dikenal di kalangan jihadis global, di masa konflik dan perang di Afghanistan. Berbeda dengan Al Qaeda, yang tidak memiliki wilayah kekuasaan dengan teritori khusus, ISIS menurut Laporan RAND (Jones, et.al., 2017) pada akhir 2014, menguasai wilayah lebih dari 100.000 km<sup>2</sup>, yang berisi lebih dari 11 juta orang, kebanyakan di Irak dan Suriah. Tahun berikutnya, Negara Islam (dalam hal ini ISIS) telah berhasil mengkooptasi jaringan militan lokal dan menambahkan provinsi baru, di Libya, Mesir, Nigeria, dan Afghanistan. Negara Islam juga memproklamkan provinsi di Arab Saudi, Aljazair, dan Kaukasus, sebagai bagian dari Negara Islam, walaupun tanpa ada kontrol langsung terhadap wilayah-wilayah tersebut. Selain wilayah kekuasaan, pengaruh ISIS juga diperoleh

dari sejumlah kelompok-kelompok jihad Salafi di berbagai negara, yaitu di Somalia, Filipina, Turki, Bangladesh, Indonesia, Mali, dan Tunisia. Berbagai organisasi ekstremis radikal di negara-negara tersebut, telah menyatakan berjanji setia kepada Negara Islam dan melobi untuk mendapatkan status menjadi provinsi ISIS.

Pada tahun 2015 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan Rencana Aksi untuk Mencegah Ekstremisme-Kekerasan. Dokumen itu menyebutkan, bahwa tidak ada negara yang imun dari dampaknya. Oleh karenanya, dokumen bernomor A/70/674 dari PBB ini menekankan, bahwa pencegahan ekstremisme-kekerasan merupakan komitmen dan kewajiban yang harus dipraktikkan negara anggota. PBB menegaskan, bahwa pencegahan ekstremisme-kekerasan tersebut harus berdasarkan nilai-nilai di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dalam bentuk penerbitan instrumen hukum dan intervensi di 7 area, yakni: Dialogue and Conflict Prevention, Strengthening Good Governance, Human Rights and The Rule of Law, Engaging Communities, Empowering Youth, Gender Equality and Empowering Women, Education, Skill Development and Employment Facilitation dan Strategic Communications, the Internet and Social Media. Di samping itu, dokumen ini juga menjelaskan pentingnya bagi negara-negara anggota untuk merumuskan kerangka kebijakan, berupa Rencana Aksi Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan. Berdasarkan pada pembahasan dalam UNGA (United Nations General Assembly), pada tahun berikutnya, juga mengeluarkan resolusi bernomor A/RES/70/291, yang merekomendasikan setiap negara untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang relevan, berdasarkan dokumen Rencana Aksi Pencegahan Ekstremisme-

Kekerasan sesuai dengan konteks nasional masing-masing.

Sebagai negara demokrasi, dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia dengan cepat merespons untuk mencegah dan menangani persoalan ini di dalam negeri. Semenjak tahun 2015, setidaknya sudah ada banyak instrumen hukum, kebijakan dan program mengenai pencegahan ekstremisme-kekerasan, yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Beberapa instrumen yang terkait antara lain: (1) Perppu no. 2 tahun 2017 yang kemudian resmi menjadi Revisi UU no 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, (2) Revisi UU no. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang memandatkan 9 Peraturan Pemerintah turunannya, dan (3) Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Terorisme (RAN PE).

Pembuatan instrumen-instrumen tersebut menuai kontroversi di masyarakat, karena adanya kekuatiran yang tinggi, bahwa pendekatan yang diambil akan mencederai nilai-nilai HAM dan demokrasi. Meskipun demikian, melalui dokumen tersebut pemerintah secara eksplisit menegaskan komitmennya untuk fokus kepada ranah pencegahan. Di dalam dokumen RAN PE, pemerintah memuat empat pilar dalam menanggulangi ekstremisme-kekerasan, yang meliputi: (1) Pencegahan; kesiapsiagaan, kontra radikalisme, perlindungan, (2) Deradikalisme, (3) Penegakan Hukum dan Penguatan Kerangka Legislasi, dan (4) Kemitraan dan Kerja Sama Internasional.

Dokumen RAN PE ini merupakan salah satu tindak-lanjut nyata, yang telah dilakukan oleh Indonesia, yang sejalan dengan strategi penanggulangan terorisme, seperti yang telah digariskan oleh PBB.

Meskipun hingga saat ini dokumen tersebut masih belum disahkan dan masih bersifat dinamis, namun secara umum dokumen ini telah menyediakan kerangka praktis yang sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam melakukan klasifikasi untuk pemetaan program, sangat diperlukan suatu kerangka konkret dan operasional, yang dapat mencakup beberapa dimensi sekaligus, seperti tercantum dalam RAN PE. Dalam hal ini, penggunaan dokumen perundang-undangan yang telah disahkan (misalnya UU Nomor 5 tahun 2018) dapat dikatakan masih tidak praktis untuk dilaksanakan, karena dokumen undang-undang tersebut hanya dimaksudkan sebagai suatu dasar hukum dan bukan sebagai kerangka rencana aksi yang praktis. Penggunaan dokumen seperti ini dalam pemetaan program akan dapat menimbulkan lebih banyak multi-interpretasi terkait pengklasifikasian. Dalam penelitian ini, dokumen RAN PE yang digunakan adalah dokumen tahun 2019, yang berisi 4 pilar –yang dipandang masih relevan dipakai sebagai acuan ketika riset ini mulai dilaksanakan.

Sejak tahun 2017, di dalam proses pematangan dokumen RAN PE, BNPT telah mengumpulkan lebih dari 40 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), yang bekerja dalam pencegahan ekstremisme-kekerasan di Indonesia. Kendati demikian, saat ini belum ada data komprehensif mengenai siapa saja aktor dan jenis-jenis intervensi yang sudah dilakukan–khususnya di bidang pendidikan, internet dan media sosial dan deradikalisasi, selama lima tahun belakangan. Sementara itu, salah satu permasalahan yang ada di dalam upaya pencegahan ekstremisme-kekerasan di Indonesia adalah tumpang-tindihnya program dan minimnya kolaborasi dan inovasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud memetakan program-program yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil selama lima tahun terakhir, terkait pencegahan ekstremisme-kekerasan, khususnya di ketiga aspek tersebut. Riset pemetaan ini ingin melihat: sejauh mana program-program yang ada menjawab persoalan yang sedang dihadapi. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menganalisis jenis-jenis program apa saja yang sudah dan belum dilakukan, siapakah aktornya dan apakah tantangan dan peluangnya? Tersedianya pengetahuan tersebut dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat kolaborasi, mengurangi ketumpangtindihan program antar aktor dan meningkatkan dampak yang diharapkan dari berbagai program, yang sudah dan sedang dilakukan.

## B. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan pengetahuan mengenai program yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil terkait pencegahan ekstremisme-kekerasan di Indonesia di bidang pendidikan, internet dan media sosial, dan deradikalisasi.
2. Mengidentifikasi hambatan dan peluang di dalam implementasi program pencegahan ekstremisme-kekerasan oleh pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia di bidang pendidikan, internet dan media sosial dan deradikalisasi.

3. Mendapatkan hasil analisis dan pendalaman berdasarkan data dan pemetaan program pencegahan ekstremisme-kekerasan oleh pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia di bidang pendidikan, internet dan media sosial dan deradikalisasi.
4. Mendapatkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan masyarakat sipil, guna memperkuat efisiensi dan efektivitas program pencegahan ekstremisme-kekerasan di Indonesia.





## BAB II

# LANDASAN TEORITIS

### A. Perspektif Teoritis Ekstremisme - Kekerasan

Meluasnya pengaruh ISIS tidak lepas dari upaya propaganda masif yang sudah dan terus mereka lakukan melalui internet. Mereka menyebarkan 'daya tarik' kelompok dengan memvisualisasikan metode kekerasan brutal -melalui konten-konten visual yang disebar di seluruh dunia, dengan tujuan untuk mengkooptasi individu dan kelompok yang tidak puas agar menjadibagian dari jaringan mereka. Meskipun demikian, pengaruh ISIS mengalami penurunan sejalan dengan menguatnya resistensi



negara-negara di dunia terhadap penguasaan teritori ISIS di Suriah dan Irak. Semenjak tahun 2016 ISIS telah kehilangan banyak teritorinya secara signifikan, hingga pada tahun 2017, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mendarat di kota Mosul –yang terkepung, menjelang malam ke 10, Juli 2017, dan mengumumkan keberhasilan Irak menguasai kembali wilayah-wilayah yang telah dikooptasi ISIS dan kekalahan dari Negara Islam. Hingga hari ini, pasca berakhirnya penguasaan teritorial oleh kelompok *Islamic State* (ISIS) di Suriah dan Irak, serangan terorisme di berbagai wilayah di dunia masih terus terjadi, meskipun telah menunjukkan tren menurun.

Penanganan ekstremisme-kekerasan yang menekankan pada strategi pencegahan adalah model yang dinilai paling tepat. Premis ini dipandang tepat, disebabkan adanya alasan sulitnya mengubah ideologi seseorang. Selain itu, strategi *hard approach* melalui penindakan dan penegakan dalam penanganan terorisme, mengandung risiko serius, yakni: rentan terhadap masalah pelanggaran HAM dan lingkungan penjara yang berisiko tinggi bagi proses radikalisisasi (Borum, 2003). Mekanisme dan program deradikalisisasi yang dijalankan di dalam penjara dinilai bukan saja belum berhasil memoderasi ideologi ekstremis dari anggota kelompok teroris dan alih-alih menyiapkan mereka untuk mengadopsi peran sosial baru saat kembali ke masyarakat, melainkan juga belum mampu mencegah kemungkinan proses radikalisisasi yang dapat dijalankan di dalam lingkungan penjara. Dengan menggunakan kerangka tahapan radikalisisasi, Silber & Bhatt (2007) menjelaskan, bahwa radikalisisasi terjadi secara bertahap. Di mana setiap tahapan mengarah pada peningkatan level ekstremisme, komitmen dan penggunaan strategi kekerasan. Kerangka tahapan radikalisisasi yang

dijelaskan oleh Silber & Bhatt (2007), pada awalnya menjelaskan, bahwa proses radikalisisasi terjadi secara *face to face*, tetapi pasca ISIS –di mana internet memainkan peran penting dalam setiap tahapan radikalisisasi, Silber & Bhatt (2017) menjelaskan, bahwa tahapan radikalisisasi secara online masih relevan dengan kerangka yang telah disusunnya. Pada fase pertama “Identifikasi diri”, ideologi ekstremis dan radikal disediakan oleh para rekruter melalui internet dan juga kesempatan untuk bertemu secara *online* dan berjejaring dengan orang-orang yang berpikiran sama. Sementara itu, pada fase kedua “Indoktrinasi”, orang tersebut telah mengadaptasi dunia radikal, yang ditegakkan melalui “tabir objektivitas” internet. Pada fase ketiga “Jihadisasi”, internet berfungsi sebagai “*enabler*”, terutama menyediakan informasi teknis tentang target dan metode. Dari aspek terakhir ini, bahkan menunjukkan tanpa kontak secara formal dengan organisasi teroris, individu, melalui manual pelatihan, video dan materi lain yang tersedia *online* dapat menjadi “mitra virtual” (Kohlmann, 2008) dan melakukan tindakan teroris hanya dengan mempelajarinya dari materi *online*. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa proses radikalisisasi dapat terjadi secara tatap muka secara langsung, maupun *online* dengan bantuan teknologi. Dalam hal ini internet dapat menyediakan komunikasi yang lebih efektif, jaringan, transmisi yang tidak terhalang, kekuatan propaganda dan pengetahuan, serta penguatan identitas kolektif.

Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak memadai jika hanya berfokus pada kelompok yang belum terpapar ideologi radikal atau yang telah tergabung dalam kelompok ekstremis radikal saja. Menurut Sekretaris Deputi VI Bidang Kesbang Kemenko Polhukam Brigjen Pol Mamboyng. Sujatmiko, saat ini terdapat lebih dari 600

narapidana kasus terorisme yang telah dibebaskan hingga periode Januari 2019, dan kurang lebih 567 lainnya saat ini sedang menjalani hukuman (<https://poskota.id/2019/05/29/narapidana-teroris-yang-sudah-bebas/>). Kondisi tersebut menuntut peningkatan resiliensi masyarakat umum terhadap radikalisme dan terorisme serta peningkatan peluang keberhasilan integrasi ekstremis ke dalam masyarakat. Peningkatan resiliensi dapat dilakukan melalui program-program *counter-narrative*, resistensi propaganda dan *law enforcement*, maupun penguatan kultur *tightness* di masyarakat. Sementara untuk kesiapan integrasi, dapat dilakukan dengan intervensi baik disengagement maupun deradikalisasi.

Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, maka penting untuk mempersiapkan dasar-dasar psikologis, yang dapat mendukung peningkatan keberhasilan resiliensi dan reintegrasi. Intervensi ideologi sudah terbukti banyak menemukan kegagalan saat dilakukan secara langsung. Alternatifnya adalah dengan intervensi deradikalisasi yang integratif, yaitu dengan menggabungkan program dukungan psikologis dan *counter-ideology* (Milla, Hudiyana & Arifin, 2020; Muluk, Umam & Milla, 2020). Aspek psikologis yang dipandang dapat memoderasi ideologi radikal adalah: identitas alternatif, konseling psikologi (Bouzar & Martin, 2018), kemampuan berpikir reflektif dan kritis (Milla & Umam, 2019), serta *open-mindedness* (Kruglanski, Gelfand, & Gunaratna, 2010), dan kompleksitas kognitif (Putra, Erika, Arimbi & Rufaeda, 2018).

Berdasarkan penjelasan perspektif teoritis tersebut, evaluasi kebijakan berdasarkan hasil pemetaan program pencegahan ekstremisme-kekerasan, yang dilakukan oleh pemerintah dan

masyarakat sipil, akan difokuskan pada kesesuaian program dengan RAN PE, ketercukupan program berdasarkan faktor-faktor psikologis yang mendukung moderasi ideologi dan kesesuaian substansi program dengan kelompok target yang sesuai dengan tahapan paparan radikalisisasi yang sudah dijalaninya.

## B. Relevansi

Pemetaan terhadap program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia ini sangat diperlukan, agar dapat diperoleh gambaran terkait bidang cakupan, jenis dan variasi program, aktor yang terlibat, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi pada saat implementasi di lapangan. Gambaran tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan yang sudah ada.

Di sini perlu ditekankan, bahwa fenomena ekstremisme-kekerasan bukan hanya merupakan masalah ideologi semata, melainkan memiliki keterkaitan dengan banyak faktor, mulai dari faktor individu, kelompok, hingga faktor sosial dan politik di level makro. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pada level kebijakan agar penanganannya dapat mencakup berbagai area dan tingkatan secara luas.

Pemahaman terhadap tahapan proses radikalisisasi sebagai kerangka pemikiran dalam menyusun kebijakan dan program pencegahan ekstremisme-kekerasan sangat penting untuk menentukan intervensi yang tepat – pada level yang sesuai, beserta dosis yang

diperlukan. Pemahaman atas tahapan proses radikalisasi juga memungkinkan kebijakan untuk memutus mata rantai radikalisme sejak dini, pada tahap ketika perkembangan ideologi ekstrem masih belum mengerucut pada ekstremisme-kekerasan, dengan asumsi upaya moderasi ideologi lebih tinggi tingkat keberhasilannya ketika masih pada tahap awal radikalisasi.

Riset “Pemetaan Kebijakan dan Program Pencegahan ekstremisme-kekerasan oleh Pemerintah dan Masyarakat Sipil di Bidang Pendidikan, Internet dan Media Sosial dan Deradikalisasi di Indonesia (2014-2019)” ini sangat dibutuhkan, sebab hingga hari ini belum pernah dilakukan pemetaan secara sistematis terhadap program pencegahan ekstremisme-kekerasan, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil–dalam hal ini *civil society organization* (CSO–sebagai partner pemerintah. Diharapkan hasil dari pemetaan dapat dijadikan dasar bagi evaluasi kebijakan dan pengembangan program pencegahan ekstremisme-kekerasan di Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan.







## BAB III

# METODOLOGI

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data yang beragam secara metode, teknik maupun sumber. Studi ini merupakan studi deskriptif, yang menggambarkan pemetaan program-program PVE di Indonesia saat ini. Pada tahap pertama dilakukan studi kualitatif, dengan menggunakan metode studi dokumentasi, FGD dan wawancara. Pendekatan kuantitatif dipilih dengan tujuan untuk memetakan program-program yang telah dijalankan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah

ditentukan. Hal ini mencakup pengklasifikasian program berdasarkan bidang dan pilar pada RAN PE, dengan melakukan tabulasi silang, sehingga menghasilkan analisis statistik deskriptif.

Pada tahap kedua dilakukan studi kuantitatif, yaitu dengan melakukan *survey* terhadap kelompok target penerima program, dan aktor PVE dari CSO. Tujuan dari *survey* kuantitatif ini adalah untuk melihat persepsi terhadap program PVE yang telah dilakukan dan sikap terhadap pemerintah. Studi kuantitatif ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan, yang menunjukkan seberapa berhasil beberapa program PVE, yang sudah dijalankan di Indonesia hingga saat ini.

## Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen, FGD, wawancara terstruktur dan *survey*. Pada studi dokumen, data diperoleh dari penelusuran dokumen-dokumen laporan penelitian dan artikel *press release*, yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga CSO terkait, tentang program PVE yang dilakukannya. Sebanyak 52 lembaga berhasil dipetakan pada tahap awal ini, yang terdiri atas: 4 lembaga pemerintah atau negara (misalnya Komnas HAM, Kominfo), 9 lembaga internasional (misalnya UNDP, UNODC, dan lain-lain), serta 39 CSO dan lembaga riset (misalnya INFID, Wahid Foundation, DASPR, dan lain-lain).

Dokumen-dokumen ini dikumpulkan sebagai langkah awal pemetaan program-program yang dilaksanakan oleh para aktor. Dari pengamatan terhadap dokumen-dokumen ini memungkinkan untuk

diketahui rentang program yang dijalankan, bidang-bidang apa saja yang menjadi fokus dari para aktor, serta bagaimana program-program tersebut dijalankan? Penelaahan terhadap dokumen laporan kegiatan program juga akan memberikan gambaran mengenai tujuan dan hasil dari suatu program, serta memungkinkan untuk melakukan analisis sederhana terhadap kekuatan dan kelemahan masing-masing program. Hal ini yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui gambaran keberhasilan program di masing-masing bidang.

Data dokumen juga digunakan untuk melihat dampak keberhasilan dari program PVE yang sudah dilaksanakan. Data yang digunakan adalah data masyarakat umum di wilayah sasaran program pencegahan radikalisme terorisme sinergisitas 36 Kementerian Lembaga. Data masyarakat umum di wilayah sasaran program sinergisitas tersebut mengukur persepsi warga terhadap pemerintah, baik pada warga yang terpapar maupun warga yang tidak terpapar radikalisme. Apabila warga terpapar radikalisme memiliki persepsi yang baik terhadap pemerintah, maka program PVE yang telah dijalankan di wilayah tersebut dapat dinilai cukup berhasil.

Selain itu, data juga dikumpulkan melalui FGD dan wawancara terstruktur langsung terhadap para aktor. Metode ini memungkinkan kita untuk melakukan triangulasi data kualitatif terhadap program-program yang telah dijalankan dan bagaimana pelaksanaannya. Selain itu, metode pengambilan data ini juga memberikan informasi tentang kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan program. Sebanyak 15 Lembaga CSO dan pemerintah terlibat dalam FGD yang dilaksanakan di Hotel Grand Cemara, pada tanggal 3 Februari

2020. Ini merupakan komponen penting yang harus diidentifikasi untuk mencapai tujuan penelitian yaitu: mengetahui peluang dan hambatan dalam pelaksanaan program di setiap bidang. Di samping itu, pengambilan data mengenai bagaimana para aktor menjalin kerja sama satu sama lain juga diperoleh melalui metode pengumpulan data ini. Data hasil dari FGD dapat memberikan gambaran secara umum tentang kendala-kendala yang biasa dialami dalam pelaksanaan program. Sementara itu, wawancara terstruktur dilakukan terhadap 13 lembaga, dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam, tentang bagaimana masing-masing aktor menjalankan programnya, kendala yang lebih spesifik yang dihadapi dalam pelaksanaan program, bentuk kerja sama yang dijalin bersama pihak lain, serta perencanaan di masa depan. Pengambilan data secara *online* juga dilakukan terhadap 9 lembaga lain, yang tidak dapat diwawancarai, untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan.

Pengambilan data kuantitatif dilakukan melalui *survey offline* dan *online*. Salah satu tujuan dari penggalan data kuantitatif adalah untuk mengetahui persepsi dan sikap terhadap program PVE yang diberikan kepada kelompok target, yaitu 31 narapidana kasus terorisme dari 13 Lembaga Pemasyarakatan. Pengambilan data ini dilaksanakan secara *offline*. Data kuantitatif ini digunakan sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi: apakah program-program PVE yang telah dilaksanakan oleh berbagai lembaga – baik pemerintahan maupun CSO – dapat diterima oleh kelompok target?

Pengambilan data terhadap 31 narapidana kasus terorisme dari 13 Lembaga Pemasyarakatan digunakan untuk mengukur 10 variabel yang dapat dijadikan indikator dalam melihat keberhasilan program PVE yang dilaksanakan, yaitu: 1) Radikalisme; 2) Integrasi masyarakat; 3) Ketaatan hukum; 4) Komitmen kelompok; 5) *Equifinality*; 6) Jihad *Qital*; 7) Persepsi ancaman; 8) Persepsi ketidakadilan; 9) Identitas alternatif; 10) Sikap terhadap program deradikalisasi. Persebaran skor pada 10 variabel ini dapat dijadikan salah satu acuan untuk melihat: apakah program deradikalisasi yang dilaksanakan sudah cukup berhasil mencapai tujuannya?

## Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan mencakup analisis data kuantitatif deskriptif dan analisis data kualitatif. Analisis dilakukan terhadap data primer dan sekunder. Menggabungkan kedua data primer dari wawancara dan FGD serta data sekunder dari analisis dokumen sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang program-program PVE yang dijalankan oleh para aktor. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif untuk melakukan klasifikasi dalam pemetaan program serta analisis kualitatif untuk meninjau peluang dan hambatan pelaksanaan program. Hasil dari analisis data akan memberikan gambaran tentang *gap* yang masih ada dalam pelaksanaan program-program PVE di Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai keberhasilan dari program PVE, yang telah dilaksanakan di Indonesia.

## Kriteria Aktor

Kriteria aktor yang diambil datanya adalah institusi/organisasi yang telah melaksanakan program PVE di bidang pendidikan, internet dan sosial media, deradikalisasi, atau kebijakan publik selama 3-5 tahun terakhir. Para aktor ini dapat berupa organisasi/institusi pemerintahan, swasta, ataupun CSO.

## Prosedur

Secara lebih rinci, terdapat 10 langkah yang dijalankan dalam penelitian ini. Skema berikut memaparkan langkah penelitian secara ringkas.



## ***Identifikasi data aktor PVE***

Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan aktor-aktor yang telah melaksanakan program-program PVE selama 3-5 tahun terakhir. Identifikasi ini dilakukan oleh INFID berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berikut adalah daftar para aktor yang telah diidentifikasi (lihat di bagian lampiran).

## ***Penelusuran data sekunder***

Setelah para aktor berhasil diidentifikasi, maka langkah berikutnya adalah melakukan penelusuran data sekunder terhadap program-program yang sudah dilaksanakan oleh para aktor. Data sekunder ini diperoleh dari penelusuran *daring* terhadap laporan-laporan kegiatan yang dipublikasikan oleh institusi/organisasi terkait serta artikel *press release* tentang program yang telah mereka jalankan. Penelusuran kegiatan ini dilakukan terhadap program-program PVE yang sudah dijalankan selama 3-5 tahun terakhir oleh setiap aktor yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya.

## ***Focus Group Discussion***

*Focus Group Discussion* dengan para aktor PVE dilakukan untuk melengkapi data-data tentang program-program, yang telah dilaksanakan oleh para aktor. Selain itu, FGD ini juga berguna untuk memperoleh pendalaman data serta mendapatkan pandangan para aktor terkait dengan pelaksanaan program-program PVE di Indonesia sejauh ini. Beberapa tujuan yang ingin diperoleh dalam FGD ini adalah:

1. Program-program yang dilaksanakan oleh para aktor selama beberapa tahun terakhir.
2. Kendala-kendala yang dialami dalam teknis pelaksanaan program secara umum.
3. Pandangan mengenai dinamika kerja sama antar CSO dan dengan Pemerintah terkait pelaksanaan program PVE.
4. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sinergisitas antar pihak di masa depan.

### ***Survey dan wawancara terstruktur***

*Survey* dan wawancara terstruktur dilakukan terhadap para aktor PVE, untuk melakukan pendalaman data tentang program yang telah dilaksanakan. Dalam *survey* dan wawancara terstruktur ini, para aktor diminta untuk menjabarkan apa saja hal-hal yang telah dilakukan, kendala-kendala spesifik untuk setiap bidang (pendidikan, internet dan sosial media, deradikalisasi, dan kebijakan), serta kendala umum teknis pelaksanaan. Data dari *survey* dan wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh *insight* yang lebih mendalam dari data-data yang telah terkumpul berdasarkan metode-metode sebelumnya. Secara lengkap, tujuan dari pengambilan data wawancara ini adalah untuk:

1. Menginventarisasi dan mendalami program-program yang dilaksanakan oleh para aktor selama beberapa tahun terakhir.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dialami dalam teknis pelaksanaan program secara spesifik untuk setiap bidang.
3. Mendalami dinamika kerja sama antar CSO yang telah dilakukan sejauh ini.

4. Mendalami dinamika kerja sama dengan pemerintah yang telah dilakukan sejauh ini.
5. Mengidentifikasi kekurangan atau *gap* yang ada dari bentuk kerja sama yang telah dilakukan dengan pihak-pihak lain.
6. Memperoleh saran dan rekomendasi spesifik untuk peningkatan kerja sama dan sinergisitas berdasarkan pengalaman masing-masing pihak.
7. Mengidentifikasi peluang pengembangan program di masa depan yang telah direncanakan oleh beberapa aktor.

### ***Triangulasi data***

Triangulasi data dilakukan untuk memastikan, bahwa data yang diperoleh telah cukup lengkap dalam mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan. Melalui proses ini, konsistensi data yang muncul melalui berbagai metode pengambilan data dapat dipastikan. Proses ini dilakukan untuk mendukung proses kompilasi data dan mempersiapkan data sebelum pemetaan dilaksanakan. Setelah proses ini, maka akan diperoleh matriks data, yang menjabarkan setiap program PVE, yang telah dilakukan oleh tiap aktor, yang kemudian dapat dipetakan berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Data dari riset yang dilakukan secara paralel juga dilakukan untuk meninjau: apakah efek dari program-program yang sudah dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang diharapkan? Sebagai contoh, apabila program deradikalisasi telah berhasil dilaksanakan secara efektif, maka seharusnya kelompok target dari program ini akan memiliki persepsi positif terhadap program yang dijalankan.

## ***Pemetaan program***

Dalam melakukan pemetaan program, terdapat dua acuan utama yang digunakan, yaitu fokus bidang dari program serta pengklasifikasian berdasarkan pilar-pilar dan fokus-fokus pada RAN PE. Tabulasi silang dilakukan untuk mengidentifikasi setiap program, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi: apa bentuk program yang telah dilakukan untuk setiap bidang, serta apakah setiap pilar dan fokus dalam RAN PE sudah cukup mendapat perhatian? Hasil dari pemetaan ini akan menunjukkan *gap* yang ada dari setiap program yang dijalankan, seperti misalnya: apakah para aktor telah cukup memberikan perhatian kepada setiap pilar, ataukah ada beberapa pilar yang masih belum cukup mendapat perhatian? Hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan program-program di masa depan, yaitu: bagaimana penguatan terhadap pilar-pilar, yang masih belum cukup mendapat perhatian, dapat menjadi fokus baru dalam pelaksanaan program PVE di tahun-tahun berikutnya.

Di samping itu, hasil analisis dari pemetaan juga akan meninjau hasil dari pelaksanaan program secara kualitatif untuk mengetahui: apakah program-program yang sudah dilaksanakan telah memiliki indikator-indikator keberhasilan sebagai bagian dari evaluasi program? Hal ini penting untuk melihat tingkat keberhasilan program-program yang telah dijalankan di setiap bidang dan setiap pilar.

## ***Identifikasi persepsi kelompok target***

Persepsi pada kelompok target diukur secara kuantitatif melalui data yang diambil terhadap:

1. Masyarakat umum di wilayah sasaran program pencegahan radikalisme terorisme sinergisitas Kementerian/Lembaga.
2. Narapidana kasus terorisme (napiter) sejumlah dari 13 Lembaga Pemasyarakatan sejumlah 31 napiter.

Pada kelompok masyarakat umum, pengukuran dan analisis dilakukan pada variabel persepsi terhadap pemerintah. Semakin baik persepsi masyarakat pada pemerintah di wilayah-wilayah ini, maka ini menunjukkan adanya keberhasilan pada program kontra radikalisme yang telah dijalankan oleh pemerintah. Sementara, pada kelompok narapidana teroris, pengukuran dilakukan terhadap 10 variabel yang dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program. Analisis terhadap 10 variabel ini dilakukan untuk menilai:

- 1) Apakah napiter memiliki sikap positif terhadap program deradikalisasi?
- 2) Apakah napiter telah mendapat manfaat dari program deradikalisasi?

## ***Mengidentifikasi kendala pelaksanaan dan peluang pengembangan***

Kendala-kendala pelaksanaan program diidentifikasi pada dua level, yaitu kendala pelaksanaan spesifik untuk bidang-bidang yang dijalankan, serta kendala-kendala yang ditemui secara umum. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh para aktor dalam mengimplementasikan

program-program PVE selama ini, sehingga dapat diketahui apa hal-hal yang perlu diantisipasi di masa depan. Analisis ini juga memberikan penjelasan mengenai adanya tingkat keberhasilan program-program yang telah dijalankan.

Identifikasi peluang pengembangan di masa depan dapat diperoleh melalui data *survey* dan wawancara yang dilakukan terhadap para aktor. Berdasarkan evaluasi hasil program-program sebelumnya, para aktor dapat mengidentifikasi apa saja hal-hal yang akan dapat dilakukan di masa depan? Secara garis besar, peluang pengembangan dapat terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu: apakah perlu untuk melanjutkan program-program sebelumnya, atau justru lebih penting untuk mengembangkan program baru yang terfokus pada hal yang berbeda? Hal ini juga akan memperkaya data, untuk mengidentifikasi apa saja hal-hal yang dapat menjadi fokus para aktor di masa depan?

### ***Saran dan rekomendasi***

Saran dan rekomendasi diberikan berdasarkan hasil analisis data pemetaan program-program yang telah dilaksanakan, beserta kendala dalam pengimplementasian teknis dan kerja sama dengan pihak lain. Saran yang diberikan terkait dengan bagaimana para aktor dapat meningkatkan kerja sama dengan para pihak lain, yaitu:

1. Kerja sama antar CSO dan CSO.
2. Kerja sama antar CSO dan pemerintah.
3. Kendala-kendala terkait apa yang menghambat dilakukannya kerja sama.

Ketiga poin tersebut akan dianalisis sebagai dasar untuk perumusan saran dan rekomendasi perbaikan. Peningkatan sinergisitas antar pihak sangat penting untuk memastikan, bahwa pelaksanaan program PVE di masa depan dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.



## BAB IV

# HASIL PEMETAAN PROGRAM

### a. Klasifikasi Program berdasarkan Bidang dan Fokus Program

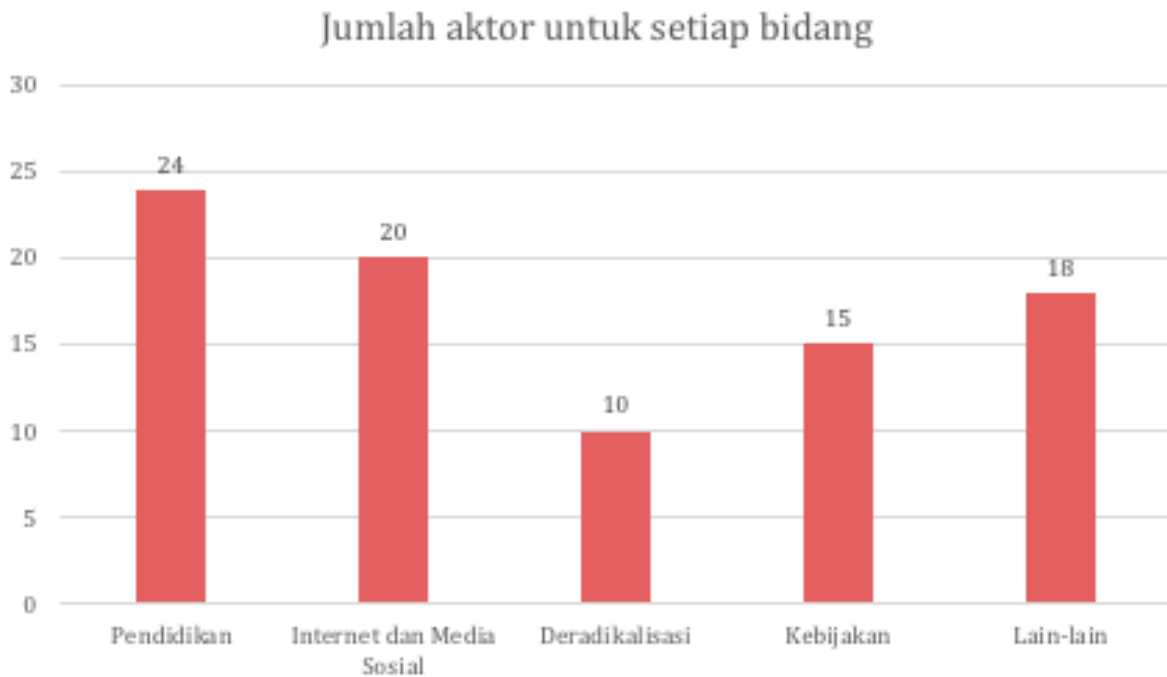
Analisis awal dilakukan dengan melakukan pengklasifikasian program-program yang sudah dijalankan berdasarkan dari bidang-bidangnya. Analisis ini dilakukan secara kualitatif, dengan memberikan penilaian terhadap fokus utama dari program-program yang dijalankan. Dari 52 Lembaga yang telah berhasil dikumpulkan datanya, diperoleh 144 program yang diidentifikasi berdasarkan penelusuran data sekunder, FGD, *survey*, maupun wawancara terstruktur. Berdasarkan hasil analisis terhadap program *Preventing Violent-Extremism* (PVE) yang telah dilakukan, program secara keseluruhan dapat diklasifikasikan menjadi lima bidang, yaitu (1) Pendidikan, (2) Internet dan Media Sosial, (3) Deradikalisasi, (4) Kebijakan, dan (5) Lain-lain, misal: Ekonomi- Sosiokultural- Politik.

**Tabel 1**  
**Jumlah Program per Bidang (N= 144)**

No	Bidang	Jumlah
1	Pendidikan	49
2	Sosial Media	14
3	Deradikalisasi	22
4	Kebijakan	28
5	Lain-lain (Ekonomi - Sosiokultural - Politik)	31

Pengklasifikasian data ini menunjukkan, bahwa sejauh ini para aktor PVE cenderung lebih fokus pada bidang pendidikan dalam mencegah kekerasan ekstrem di Indonesia. Sebagai penjelasan, untuk kategori lain-lain pada Gambar 1 adalah bidang ekonomi - sosiokultural - politik.

**Gambar 1**  
**Kategori Aktor Setiap Bidang**



Setelah pengklasifikasian berdasarkan bidang yang dilaksanakan, langkah berikutnya adalah melakukan klasifikasi berdasarkan pilar-pilar dan fokus dalam RAN PE. Analisis untuk pengklasifikasian ini dilakukan secara kualitatif dengan melihat karakteristik, tujuan, serta fokus dari setiap program, yang dikerjakan oleh 87 aktor dari masyarakat sipil. Hasil dari pengklasifikasian ini seperti nampak dalam tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Kesesuaian Pilar RAN PE berdasarkan Fokus Program Ekstremisme–Kekerasan (N= 144)**

Pilar	Deskripsi	Fokus	Jumlah Program	Total
1	Pencegahan (Kesiapsiagaan, kontra radikalisisasi, perlindungan)	Penguatan dan Pemanfaatan data-data pendukung (Kesiapsiagaan).	18	97
		Peningkatan kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan (Kesiapsiagaan).	15	
		Efektivitas kampanye pencegahan di kalangan kelompok rentan (kontra radikalisisasi).	37	
		Penguatan daya tahan kelompok rentan (kontra radikalisisasi).	27	
2	Deradikalisisasi	Penanggulangan ekstremisme di Lembaga Masyarakat.	4	10
		Program pelepasan ( <i>disengagement</i> ) di luar Lembaga Masyarakat.	6	
3	Penegakan hukum dan penguatan kerangka legislasi	Penyelarasan kerangka hukum nasional dengan kerangka hukum internasional.	2	23
		Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan.	13	
		Penguatan koordinasi dalam penegakan hukum.	7	

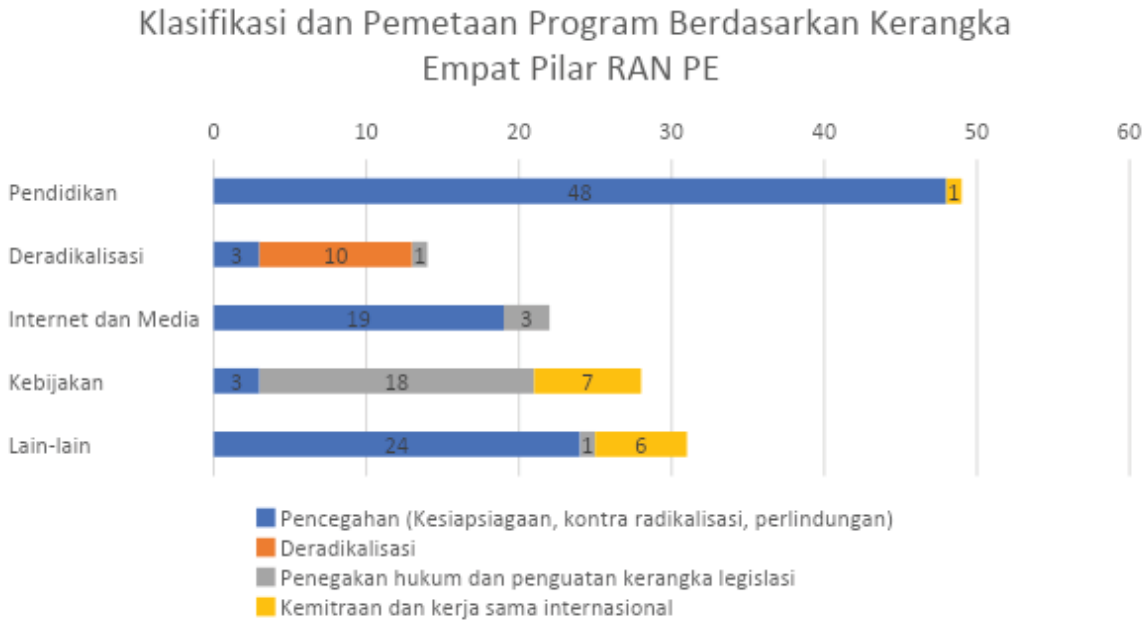
Pilar	Deskripsi	Fokus	Jumlah Program	Total
4	Kemitraan dan kerja sama internasional	Peningkatan kapasitas kemitraan para pemangku kepentingan.	4	14
		Peningkatan kerja sama internasional.	7	
		Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan monitoring.	3	

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan, bahwa dari 144 program –yang telah dilaksanakan oleh masyarakat sipil– telah memenuhi keempat pilar RAN PE, yaitu: pencegahan, deradikalisasi, penegakan hukum dan kemitraan kerjasama internasional. Adapun salah satu kategori program dalam ranah pencegahan dan kesiapsiagaan, yaitu: pengamanan obyek-obyek vital, transportasi, dan wilayah-wilayah publik lain. perlindungan, seperti: *database mining* tentang obyek vital, transportasi, dan wilayah lain, sosialisasi dan peningkatan kapasitas pengelola tempat publik sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah tanpa keterlibatan dari masyarakat sipil.

## **b. Klasifikasi dan Pemetaan Program berdasarkan Kerangka 4 Pilar RAN PE**

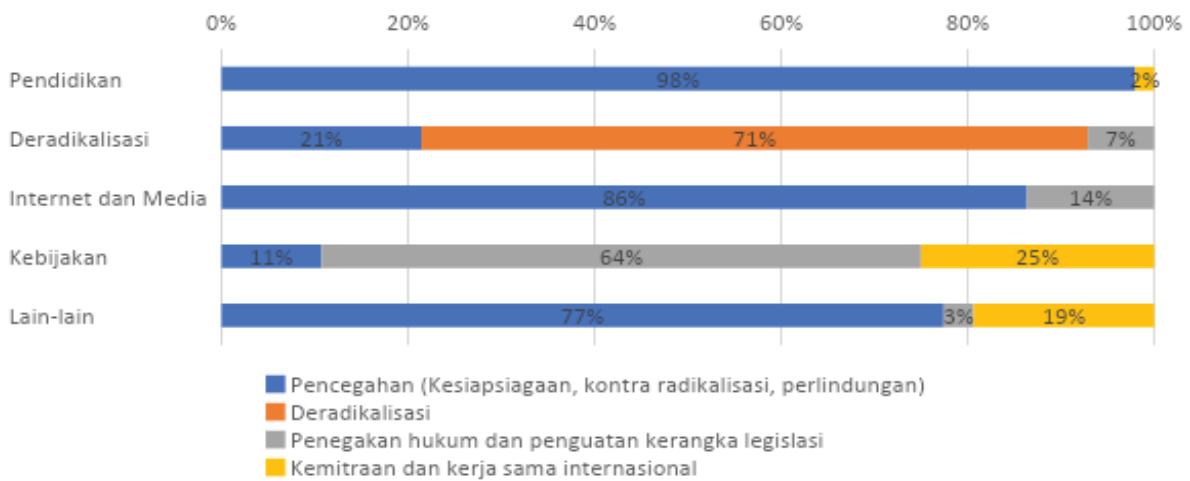
Analisis berikutnya adalah melakukan tabulasi silang, untuk melihat: apakah sudah ada program-program yang mencakup seluruh pilar RAN PE dari setiap bidang? Hal ini dilakukan guna mengidentifikasi penguatan-penguatan yang perlu dilakukan untuk pilar-pilar, maupun bidang-bidang tertentu.

**Gambar 2**  
**Klasifikasi dan Pemetaan Program berdasarkan Kerangka Empat Pilar RAN PE**



Berdasarkan Gambar 2 dapat ditunjukkan, bahwa program pendidikan merupakan program yang paling banyak dikerjakan oleh masyarakat sipil, dan domain pencegahan yang paling diisi oleh masyarakat sipil dalam program-program ekstremisme-kekerasan.

**Klasifikasi dan Pemetaan Program Berdasarkan Kerangka 4 Pilar RAN PE (Dalam Persentase)**



Secara umum, bidang yang terlihat sudah cukup mendapat perhatian adalah bidang pendidikan dan kebijakan. Pada bidang pendidikan, sebanyak 98% program merupakan program yang memperkuat pilar pencegahan, yaitu: mendorong adanya Kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, maupun perlindungan. Sementara, pada kebijakan, sebagian besar program memang menyorot pada: penguatan pilar penegakan hukum dan penguatan kerangka legislasi.

Sementara itu, bidang yang masih kurang mendapat perhatian adalah: bidang deradikalisasi dan bidang internet dan media sosial. Jumlah program pada bidang-bidang ini relatif lebih sedikit dibanding bidang lainnya. Pada bidang internet dan media sosial, sudah terdapat program-program yang memperkuat pencegahan dan kerangka penegakan hukum. Sementara pada bidang deradikalisasi, sudah mencakup penegakan kerangka hukum (misalnya pembentukan SOP dalam program deradikalisasi), maupun penanggulangan ekstremisme di Lembaga Masyarakat dan program *disengagement* di luar Lembaga Masyarakat. Pembahasan lebih dalam untuk setiap bidang akan dilakukan pada sub-bab berikutnya.

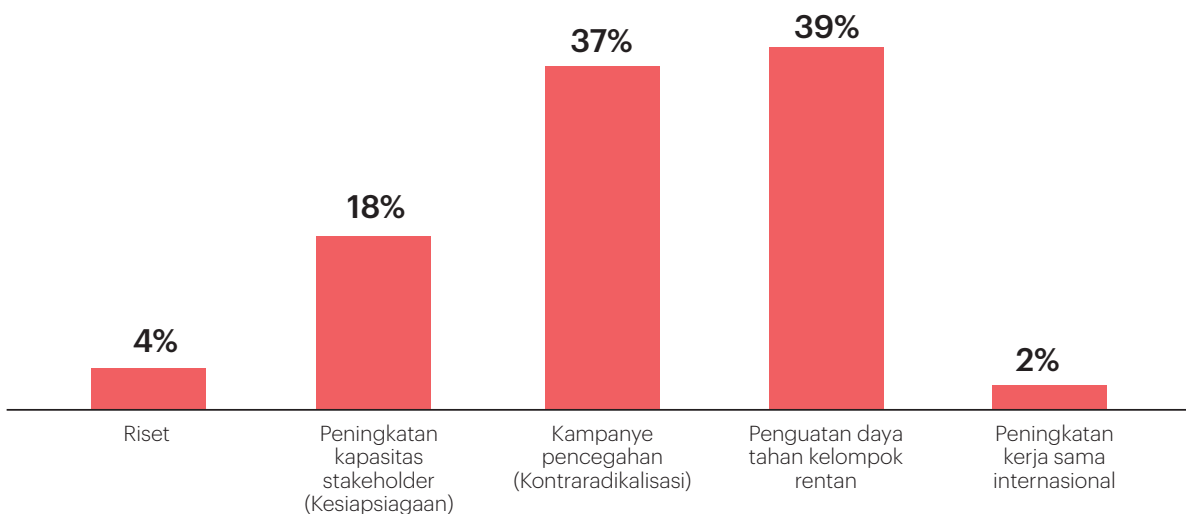
## **1. Bidang Pendidikan**

Berikutnya, akan dijelaskan gambaran dari fokus program bidang pendidikan, berdasarkan kerangka pilar RAN PE beserta jumlah kegiatannya.

**Tabel 3**  
**Fokus program Pendidikan berdasarkan Pilar RAN PE (N=49)**

Pilar	Deskripsi	Fokus	Jumlah Program	Total
1	Pencegahan (Kesiapsiagaan, kontra radikalisisasi, perlindungan)	Penguatan dan Pemanfaatan data-data pendukung (Kesiapsiagaan).	2	48
		Peningkatan kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan (Kesiapsiagaan).	9	
		Efektivitas kampanye pencegahan di kalangan kelompok rentan (kontra radikalisisasi).	18	
		Penguatan daya tahan kelompok rentan (kontra radikalisisasi).	19	
4	Kemitraan dan kerja sama internasional	Peningkatan kerja sama internasional.	1	1

### Bidang Pendidikan



Bidang pendidikan merupakan bidang yang menyumbang jumlah program PVE terbanyak di Indonesia. Hampir seluruh program di bidang pendidikan didominasi oleh pilar pertama pada RAN PE, yaitu terkait pencegahan dan kontra radikalisme. Lebih jauh lagi, pada pilar 1, sebagian besar program yang dilakukan berada pada fokus ke-3, yaitu: efektivitas kampanye pencegahan di kalangan kelompok rentan (kontra radikalisme) dan fokus ke-4 yaitu penguatan daya tahan kelompok rentan (kontra radikalisme). Adapun kelompok rentan yang secara spesifik telah dijadikan sasaran program adalah remaja dan perempuan.

Terdapat 24 lembaga yang sudah menjalankan program-programnya di bidang ini. Para aktor sudah memberikan peran yang cukup maksimal di bidang ini, yaitu: dengan mengadakan program-program pendidikan yang melibatkan kampanye dan penguatan daya tahan dari kelompok rentan. Wahid Foundation misalnya, telah menjalankan Program Sekolah Damai, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang menerapkan nilai inklusivitas dan perdamaian. Program ini dapat mendorong adanya nilai toleransi sejak dini, sehingga merupakan program yang efektif dalam pilar pencegahan. Contoh lainnya adalah PPIM dan CONVEY, yang telah menerbitkan berbagai modul pendidikan bagi siswa untuk menguatkan pemahaman moderasi beragama.

Lembaga-lembaga yang berperan di bidang ini antara lain:

No	Lembaga	No	Lembaga	No	Lembaga
1	AMAN Indonesia	9	Imparsial	17	PROTECT (UNDP)
2	CONVEY	10	IMVIRE	18	PUSAD Paramadina
3	DASPR	11	Indika <i>Foundation</i>	19	Ristekdikti
4	ELSAM	12	Jaringan Gusdurian	20	Sabang Merauke
5	Fahmina <i>Institute</i>	13	Lembaga Kajian Islam dan Sosial	21	<i>Search for Common Ground (SFCG)</i>
6	Gerakan Islam Cinta	14	Maarif <i>Institute</i>	22	SETARA <i>Institute</i>
7	<i>Global Peace Foundation</i>	15	<i>Peace Generation</i>	23	UNDP
8	ICIP	16	PPIM UIN Jakarta	24	Wahid <i>Foundation</i>

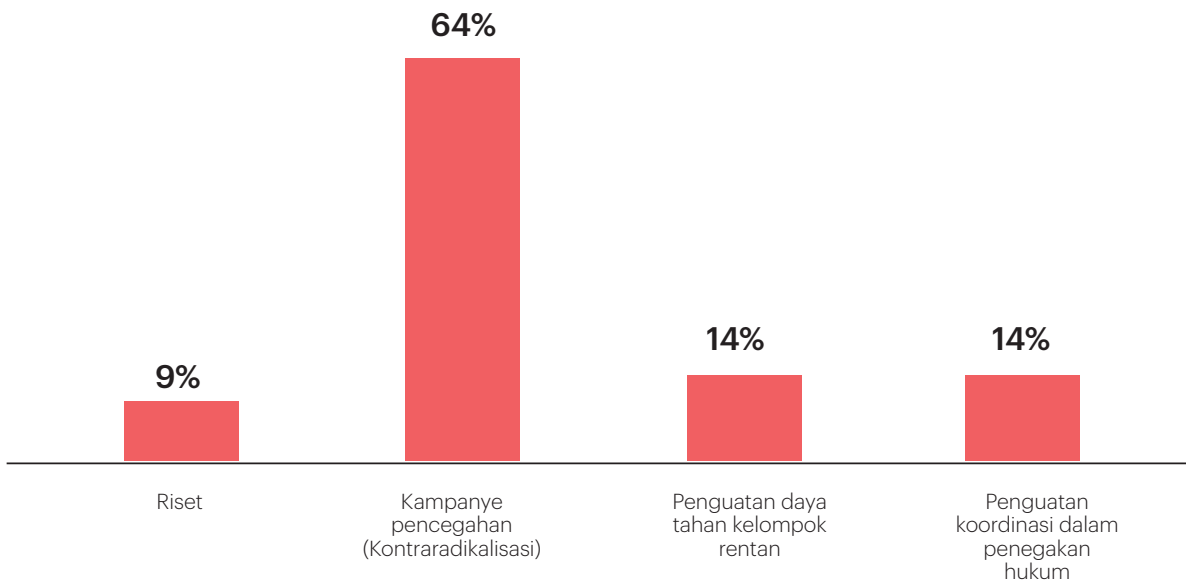
## 2. Internet dan Sosial Media

Berikut ini akan dijelaskan gambaran dari fokus program bidang internet dan sosial media berdasarkan kerangka pilar RAN PE, beserta jumlah kegiatannya.

**Gambar 4**  
**Fokus program internet dan sosial media berdasarkan Pilar RAN PE (N= 22)**

Pilar	Deskripsi	Fokus	Jumlah Program	Total
1	Pencegahan (Kesiapsiagaan, kontra radikalisi, perlindungan)	Penguatan dan Pemanfaatan data-data pendukung (Kesiapsiagaan).	2	19
		Efektivitas kampanye pencegahan di kalangan kelompok rentan (kontra radikalisi).	14	
		Penguatan daya tahan kelompok rentan (kontra radikalisi).	3	
3	Penegakan hukum dan penguatan kerangka legislasi	Penguatan koordinasi dalam penegakan hukum.	3	3

### Internet dan Media Sosial



Sementara itu, program-program di bidang sosial media sudah dilaksanakan dalam pilar 1: Pencegahan (Kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, perlindungan) dan pilar 3: Penegakan hukum dan penguatan kerangka legislasi. Pada pilar 1, sebagian besar program yang dijalankan dapat dikategorikan untuk masuk ke dalam fokus 2: Kampanye pencegahan di kalangan kelompok rentan. Program-program di bidang internet dan sosial media sebagian besar melibatkan bagaimana pencegahan atau *counter* narasi dari ekstremisme-kekerasan dapat disebarluaskan seluas-luasnya dalam jagad maya. Pembuatan konten-konten yang memuat kata kunci tertentu biasanya menjadi salah satu dasar penting yang mendasari program-program yang dilakukan di sini. Salah satu lembaga yang menjalankan hampir keseluruhan programnya di bidang ini adalah Islami.co. Program utama yang dijalankan adalah memenangi pertarungan kata kunci di internet, terutama google, seperti: 1) Jihad; 2) Perang dalam Islam; 3) Kafir; 4) *Alwa wal bara*, dan lain-lain. Lembaga ini berupaya untuk membanjiri internet dengan konten-konten Islam moderat, yang mengelaborasi kata-kata kunci tersebut, sehingga dapat menekan penyebaran paham ekstremisme kekerasan yang beredar di internet. Monitoring dan evaluasi dari program di bidang ini biasanya dilakukan dengan membandingkan ranking website Islam moderat dengan ekstremis, serta melihat persebaran pahamnya di media sosial.

Di samping CSO, lembaga internasional pun juga berperan dalam bidang ini. Peran lembaga internasional di bidang ini terutama terkait pilar ke-3, yaitu: penegakan hukum dan kerangka legislasi. Pada pilar ini, lembaga internasional seperti Facebook, Twitter, maupun Google di Indonesia telah menjalankan perannya dalam menggarisbawahi

penegakan hukum dan legislasi terkait konten yang beredar di *platform* mereka. Ketiga lembaga ini telah menerapkan filter konten yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat membantu memerangi ekstremisme-kekerasan dengan membatasi peredaran kontennya di internet. Konten-konten yang mengarah pada dukungan ekstremisme-kekerasan akan dihapus secara langsung, bahkan akun-akun yang menyebarkan paham tersebut juga akan ditindak dengan cara pemberian *suspension*. Penegakan hukum ini tentunya juga bekerjasama dengan lapisan masyarakat yang senantiasa aktif melaporkan apabila ada akun-akun yang menjurus ke arah yang mendukung ekstremisme-kekerasan.

Lembaga-lembaga yang berperan dalam bidang ini antara lain:

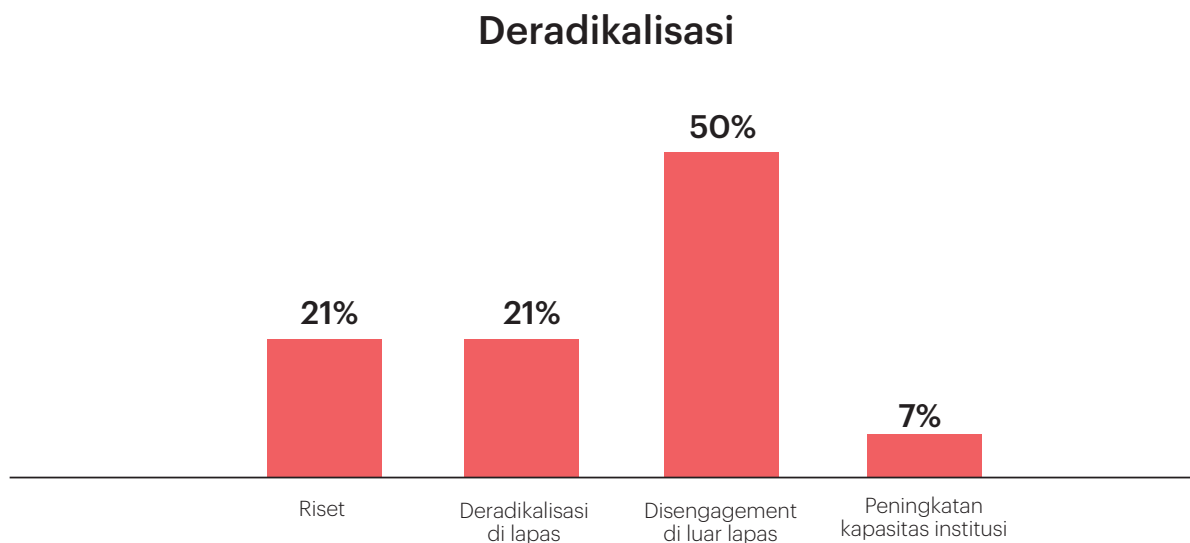
No	Lembaga	No	Lembaga	No	Lembaga
1	AMAN Indonesia	9	Lembaga Kajian Islam dan Sosial	17	UNDP
2	DASPR	10	PPIM UIN Jakarta	18	UNODC
3	Facebook	11	<i>PROTECT</i> (UNDP)	19	Yayasan Prasasti Perdamaian
4	Google	12	Sabang Merauke	20	NU <i>Online</i>
5	Indika <i>Foundation</i>	13	<i>Search for Common Ground</i> (SFCG)		
6	INFID	14	SETARA Institute		
7	Islami.co	15	<i>The Habibie Center</i>		
8	Jaringan Gusdurian	16	Twitter		

### 3. Deradikalisasi

Berikut ini akan dijelaskan gambaran dari fokus program bidang deradikalisasi, berdasarkan kerangka pilar RAN PE, beserta jumlah kegiatannya.

**Tabel 5**  
**Fokus program Deradikalisasi berdasarkan Pilar RAN PE (N= 14)**

Pilar	Deskripsi	Fokus	Jumlah Program	Total
1	Pencegahan (Kesiapsiagaan, kontra radikalisisasi, perlindungan)	Penguatan dan Pemanfaatan data-data pendukung (Kesiapsiagaan).	3	3
2	Deradikalisasi	Penanggulangan ekstremisme di Lembaga Masyarakat.	4	10
		Program pelepasan ( <i>disengagement</i> ) di luar Lembaga Masyarakat.	6	
3	Penegakan hukum dan penguatan kerangka legislasi	Peningkatan kapasitas institusi penegakan hukum.	1	1



Sebagian besar program deradikalisasi dilaksanakan dalam kerangka pilar 2: Deradikalisasi. Pada bidang ini, sudah ada program-program yang dilaksanakan untuk melakukan deradikalisasi, baik di Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan. Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) merupakan salah satu lembaga yang sangat terfokus pada bidang ini. Program *Outreach Division* merupakan program yang melibatkan fokus 2: Program pelepasan (*disengagement*) di luar Lembaga Pemasyarakatan. Program ini fokus pada mendukung mantan teroris dan keluarga mereka. Proses ini adalah bagian dari *disengagement* dan reintegrasi untuk para napiter. Hal ini melibatkan *trauma healing therapy, discussion, kunjungan rutin, training soft skills, dan entrepreneurship coaching dan assistance*.

Dalam program ini, mantan napiter sangat didukung untuk dapat mengintegrasikan diri Kembali ke masyarakat selepas dari Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, YPP juga memiliki program *Capacity Building* yang mengakomodir fokus 1: Penanggulangan ekstremisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dalam program ini, dilakukan pelatihan terhadap para petugas penjara supaya dapat menangani napiter dengan lebih baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di samping itu, penguatan pada pilar 1, yaitu terkait riset data pendukung tentang penanganan radikalisme baik di dalam dan di luar Lapas yang sudah dilakukan. Selain itu, penguatan kerangka legislasi dalam bentuk *Standard Operating Procedure (SOP)* tentang reintegrasi dan rehabilitasi napiter juga telah disosialisasikan, salah satunya oleh C-Save. Di sini patut ditekankan, bahwa tidak banyak kelompok masyarakat sipil, khususnya CSO, yang berfokus mengerjakan domain deradikalisasi ini.

Lembaga-lembaga yang berperan dalam bidang ini adalah:

No	Lembaga	No	Lembaga
1	AIDA	6	Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme UI
2	CRCS Yogyakarta	7	<i>Search for Common Ground</i> (SFCG)
3	C-Save	8	SETARA Institute
4	DASPR	9	Yayasan Lingkar Perdamaian
5	IMCC	10	Yayasan Prasasti Perdamaian

#### 4. Kebijakan

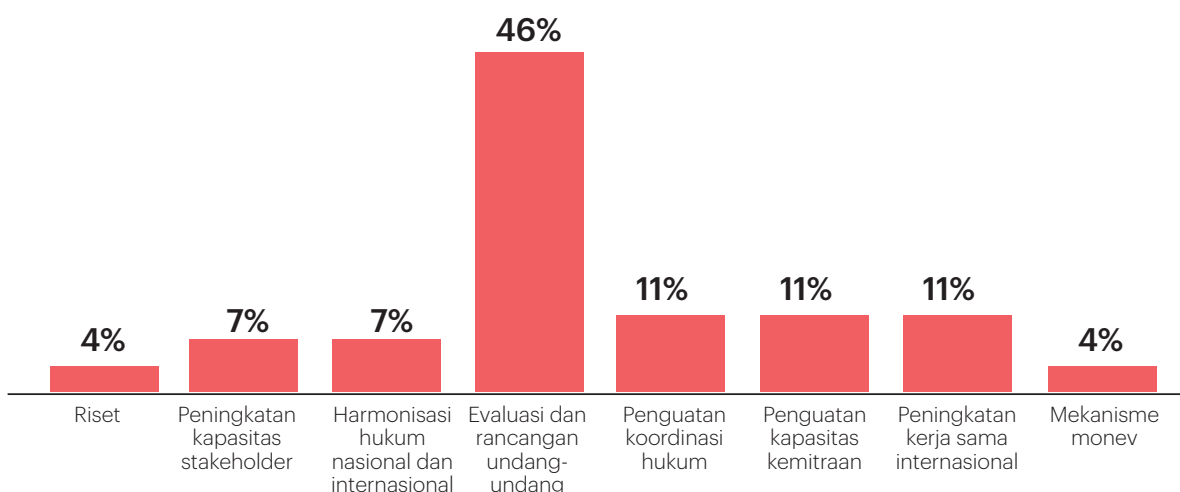
Berikut akan dijelaskan gambaran dari fokus program bidang kebijakan, berdasarkan kerangka pilar RAN PE, beserta jumlah kegiatannya.

**Tabel 6**  
**Fokus program kebijakan berdasarkan Pilar RAN PE (N= 28)**

Pilar	Deskripsi	Fokus	Jumlah Program	Total
1	Pencegahan (Kesiapsiagaan, kontra radikalisme, perlindungan)	Penguatan dan Pemanfaatan data-data pendukung (Kesiapsiagaan).	1	3
		Peningkatan kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan (Kesiapsiagaan).	2	
3	Penegakan hukum dan penguatan kerangka legislasi	Penyelarasan kerangka hukum nasional dengan kerangka hukum internasional.	2	18
		Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan.	13	
		Penguatan koordinasi dalam penegakan hukum.	3	

Pilar	Deskripsi	Fokus	Jumlah Program	Total
4	Kemitraan dan kerja sama internasional	Peningkatan kapasitas kemitraan para pemangku kepentingan.	3	7
		Peningkatan kerja sama internasional.	3	
		Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan monitoring.	1	

### Kebijakan



Program-program dalam bidang kebijakan sebagian besar melibatkan pilar 3: Penegakan hukum dan penguatan kerangka legislasi. Dari seluruh program di bidang ini, sebagian besar program masuk dalam kategori fokus 3: Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan, bahwa para aktor telah berperan dalam menyusun kertas-kertas kebijakan untuk mendukung pemerintah dalam mempersiapkan kerangka hukum dan legislasi yang tepat dalam menjalankan program-program PVE. Dalam bidang ini, berbagai CSO telah berkolaborasi bersama maupun bergerak sendiri-sendiri untuk membuat kertas

kebijakan. Salah satu program yang melibatkan kolaborasi berbagai CSO (The Habibie Center, Komunitas Belajar Islam, Elsam, IMCC, AMAN Indonesia, ICJR, Komnas Perempuan, SFCG, dan YPP) sudah menulis 9 Kertas Kebijakan terkait RUU Terorisme; Reformasi BNPT; Peran CSO dalam Penanganan Terorisme; Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme: Mengembalikan Peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Terorisme; Perempuan dalam CVE; Penanganan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme; Deradikalisasi untuk Transformasi Sosial Pelaku Terorisme; Definisi Terorisme yang Komprehensif dan Universal dalam UU Terorisme Indonesia.

Selain itu, dalam bidang kebijakan, beberapa lembaga internasional juga telah berkolaborasi bersama pemerintah serta CSO untuk melakukan program-program PVE, yang fokus pada pilar 4: Kemitraan dan Kerja Sama Internasional. Salah satu contohnya adalah kerja sama Indonesia dengan UNODC dalam menanggulangi terorisme, dengan menjalankan berbagai macam inisiatif di daerah legislatif, *counter-terrorist financing*, *prevention of violent extremism*, deradikalisasi, dan *prison management*.

Lembaga-lembaga yang berperan dalam bidang ini antara lain:

No	Lembaga	No	Lembaga	No	Lembaga
1	AMAN Indonesia	6	Jaringan Gusdurian	11	SETARA Institute
2	C-Save	7	Kemenko PMK	12	The Habibie Center
3	Fahmina Institute	8	Kominfo	13	UNDP
4	Imparsial	9	KOMNASHAM	14	UNODC
5	INFID	10	PROTECT (UNDP)	15	Wahid Foundation

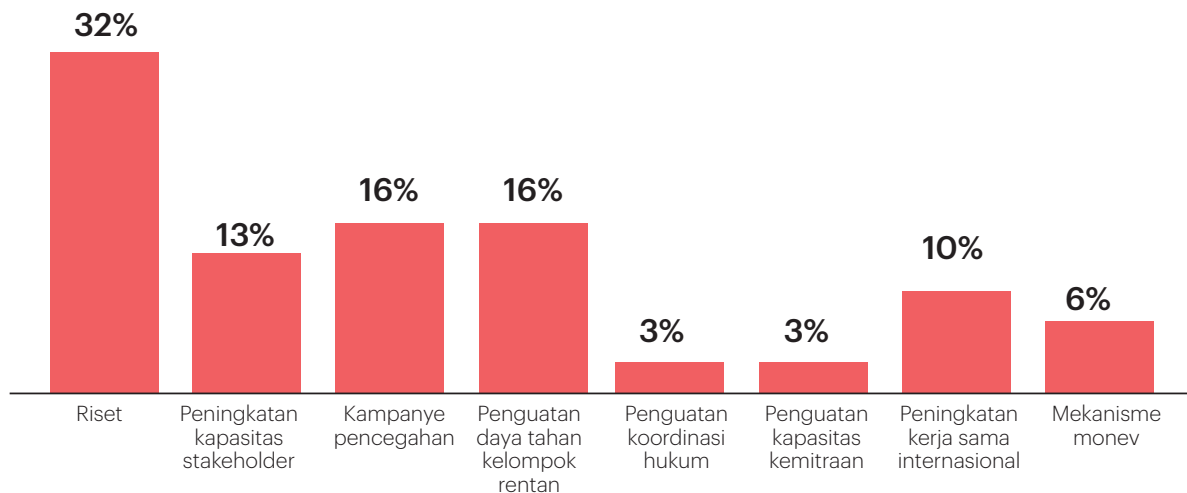
## 5. Ekonomi – Sosiokultural - Politik

Berikut ini akan dijelaskan gambaran dari fokus program bidang Ekonomi–Sosiokultural–Politik, berdasarkan kerangka pilar RAN PE, beserta jumlah kegiatannya.

**Tabel 6**  
**Fokus program ekonomi – sosiokultural - politik (lain-lain) berdasarkan Pilar RAN PE (N= 33)**

Pilar	Deskripsi	Fokus	Jumlah Program	Total
1	Pencegahan (Kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, perlindungan)	Penguatan dan Pemanfaatan data-data pendukung (Kesiapsiagaan).	10	24
		Peningkatan kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan (Kesiapsiagaan).	4	
		Efektivitas kampanye pencegahan di kalangan kelompok rentan (kontra radikalisasi).	5	
		Penguatan daya tahan kelompok rentan (kontra radikalisasi).	5	
3	Penegakan hukum dan penguatan kerangka legislasi	Penguatan koordinasi dalam penegakan hukum.	1	1
4	Kemitraan dan kerja sama internasional	Peningkatan kapasitas kemitraan para pemangku kepentingan.	1	6
		Peningkatan kerja sama internasional.	3	
		Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan monitoring.	2	

## Sosiokultural dan Politik



Bidang ini melibatkan program-program yang tidak dapat digolongkan dalam bidang-bidang sebelumnya. Salah satu program yang termasuk dalam bidang ini adalah program-program yang terfokus di bidang ekonomi-sosio-kultural-politik, seperti: 1) Program 'Women's School for Peace' dan 'Girls Ambassadors for Peace' oleh AMAN Indonesia yang bertujuan untuk mengedukasi perempuan menjadi pemimpin dan agen perdamaian dalam mencegah radikalisme, kekerasan, dan konflik; 2) Program 'Desa Damai' oleh Wahid Foundation yang bertujuan untuk mencegah bahaya radikalisme melalui pemberdayaan komunitas dengan menumbuhkan kelekatan dan kesetaraan sosial; 3) Kegiatan NU yang meliputi pelayanan sosial melalui pemanfaatan zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Khusus pelayanan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas umat melalui pembaharuan kurikulum yang seimbang antara substansi agama dan keduniawian, guna membentuk generasi yang berpandangan luas, teguh pada jati diri bangsa dan mandiri. Studi tentang Islam nusantara mulai dikembangkan agar bisa menjadi alternatif model

Islam dunia untuk mengatasi keterpurukan umat Islam. Kegiatan sosial ini penting untuk mewujudkan empati kepada mereka yang termarginalkan secara sosial

Selain itu, terdapat juga program yang terfokus di bidang ekonomi seperti Koperasi Cinta Damai oleh Wahid *Foundation*. Program ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok tertinggal, tidak mampu, dan miskin untuk keluar dari jeratan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi mikro. Dalam pemberdayaan ini, Wahid juga berupaya untuk menumbuhkan sikap menghormati perbedaan dan toleransi beragama. NU pun memiliki program yang bergerak di bidang ekonomi, yaitu bidang pemberdayaan ekonomi umat. Kegiatan ini diarahkan untuk menggelorakan jiwa kewirausahaan dikalangan *nahdliyin* dan pengembangan ekonomi *syariah*, dengan tujuan jangka menengah dan panjang guna membentengi umat dari dominasi kapitalisme global. Kegiatan ini sekaligus untuk mempraktekkan semangat pluralitas di bidang ekonomi, antara yang kaya dengan yang miskin, suatu sinergi antara mereka yang kuat secara ekonomi, dengan yang lemah demi kemaslahatan bersama.

Di samping itu, program-program yang melibatkan penelitian PVE secara umum juga dilakukan, misalnya penelitian INFID terkait tren ekstremisme pada berbagai negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Penelitian-penelitian seperti ini sangat berperan dalam memperkuat data-data pendukung, yang kemudian dapat dijadikan acuan untuk perencanaan berbagai macam program di bidang-bidang lain. Selain itu, terdapat juga program *The Habibie Center*, yaitu pembangunan DETEKSI, sebuah *database* terorisme dan kontra terorisme di Indonesia. *Database* ini dapat berperan sebagai

pusat informasi untuk PVE serta menjadi salah satu komponen untuk membangun *early warning system*. Program-program ini merupakan program yang tidak dapat dikategorikan ke dalam 4 kategori sebelumnya.

Lembaga-lembaga yang berperan dalam bidang ekonomi, sosiokultural, dan politik antara lain:

No	Lembaga	No	Lembaga	No	Lembaga
1	AMAN Indonesia	7	NU Online	13	<i>The Asia Foundation</i>
2	ICRP	8	P3M	14	<i>The Habibie Center</i>
3	INFID	9	PP Muhammadiyah	15	<i>UN Women</i>
4	<i>Institute for Policy Analysis of Conflict</i>	10	PSTPG UIN Jakarta	16	<i>US Department of State</i>
5	Jaringan Gusdurian	11	<i>Royal United Services Institute</i>	17	<i>Wahid Foundation</i>
6	Koalisi Perempuan Indonesia	12	<i>Search for Common Ground (SFCG)</i>	18	WGWC

## c. Persepsi dan Sikap terhadap Program PVE dari Kelompok Target

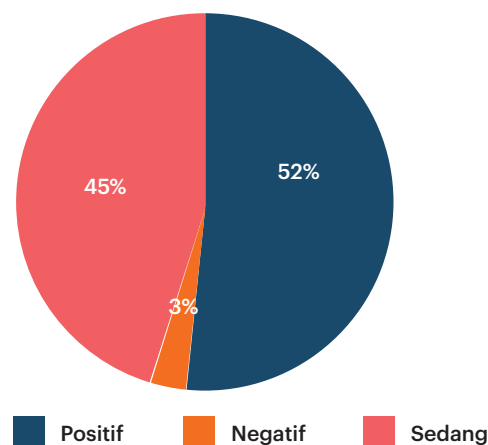
### 1. Sikap narapidana terorisme terhadap program deradikalisasi

Pada pengukuran data kuantitatif yang dilakukan terhadap 31 narapidana dari 13 Lembaga Pemasyarakatan, diperoleh hasil: sebanyak 52% narapidana sudah memiliki sikap yang positif terhadap program deradikalisasi yang sedang dijalankan. Sementara itu, sebanyak 45%

memiliki sikap sedang dan hanya sebanyak 3% yang memiliki sikap negatif. Hal ini menunjukkan adanya sentimen positif, bahwa program deradikalisasi yang telah dijalankan sejauh ini dapat diterima dengan cukup baik oleh target sasaran.

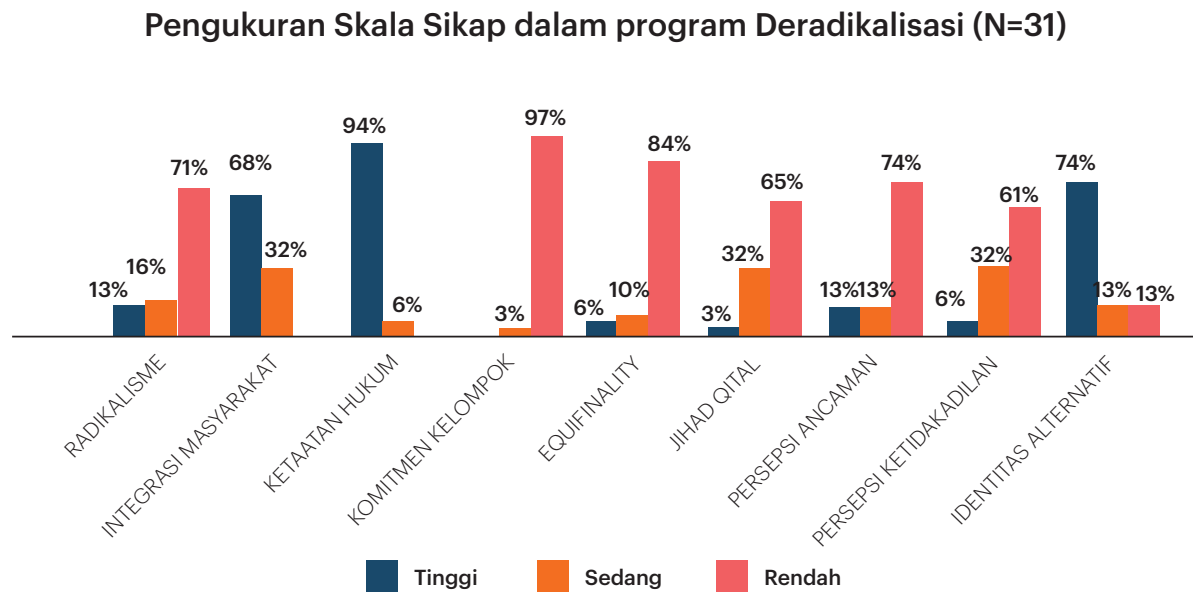
**Gambar 4**  
**Sikap terhadap program deradikalisasi**

**Posisi sikap terhadap deeadikalisasi (N=31)**



Sementara itu, pengukuran terhadap kelompok target menunjukkan, bahwa sebagian besar sampel memiliki skala rendah pada variabel-variabel yang menjadi faktor risiko (Radikalisme, Komitmen Kelompok, *Equifinality*, *Jihad Qital*, Persepsi Keterancaman, dan Persepsi Ketidakadilan). Sikap dari kelompok target program deradikalisasi –yakni: narapidana terorisme– menunjukkan, bahwa mereka memiliki sikap positif untuk variabel-variabel yang menjadi indikator keberhasilan deradikalisasi (Integrasi ke Masyarakat, Ketaatan Hukum, Adopsi Identitas Alternatif). Program deradikalisasi yang telah dilaksanakan sejauh ini dapat diterima dengan baik dan telah membuat perubahan pada kelompok target.

**Gambar 6**  
**Sikap Narapidana Terorisme berdasarkan Aspek Radikalisme**



## 2. Persepsi masyarakat target terhadap program pencegahan radikalisme terorisme sinergisitas kementerian dan lembaga

Berikut akan dijelaskan program pencegahan radikalisme terorisme sinergisitas Kementerian dan Lembaga yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui 36 Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Program sinergisitas merupakan program yang dilaksanakan oleh setiap Kementerian dan Lembaga yang terlibat dan terkoordinasi. Program ini telah berjalan memasuki tahun ketiga sejak tahun 2018. Berdasarkan program sinergisitas dapat dijelaskan jenis program dan kegiatan peserta evaluasi program dari kelompok sasaran. Data ini diperoleh dari laporan program sinergisitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang telah dipresentasikan pada bulan November 2019 kepada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) dan *stakeholder* terkait. Data laporan program

sinergisitas yang dijadikan acuan sebagai bahan evaluasi adalah data masyarakat umum di wilayah sasaran program pencegahan radikalisme dan terorisme oleh 36 Kementerian dan Lembaga.

Terdapat sejumlah program pencegahan radikalisme dan terorisme yang sudah dijalankan oleh berbagai Kementerian. Fokus kegiatan sinergisitas yang digawangi oleh BNPT tersebut difokuskan di tiga wilayah sasaran meliputi program-program dalam domain (1) Bantuan pembangunan fisik, (2) Pemberdayaan ekonomi, (3) Bantuan pendidikan, beasiswa, buku, (4) Penguatan wawasan kebangsaan, dan (5) Moderasi beragama. Wilayah sasaran yang ditetapkan (1) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan konsentrasi pelaksanaan program di 3 Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima; (2) Provinsi Sulawesi Tengah, dengan konsentrasi pelaksanaan program di 5 Kota/Kabupaten, yaitu: Kabupaten Poso, Kota Palu, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Morowali; dan (3) Provinsi Jawa Timur, dengan konsentrasi pelaksanaan program di 5 Kabupaten/Kota, yaitu: Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan.

Kegiatan sinergisitas di wilayah sasaran bervariasi dalam implementasi dan jenis kegiatan sesuai kebutuhan wilayah, namun tetap mengacu pada domain yang ditetapkan. Sejak tahun 2018 hingga sekarang, sebagian kegiatan dari seluruh rancangan program sudah berhasil dilaksanakan dan masih berlanjut hingga saat ini. Adapun kegiatan yang sudah maupun sedang berlangsung di tiga wilayah sasaran ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Deskripsi Program Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Sinergisitas 36**  
**Kementerian Lembaga**

	Pendidikan <b>KONTRA RADIKAL</b>	Deradikalisasi	Ekonomi -Sosiokultural - Politik <b>SARANA</b> <b>KONTAK</b>
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	Seminar wawasan kebangsaan Pancasila, TPA anak kelompok radikal, Dialog Kebangsaan, Kegiatan sosial dengan kelompok radikal, buletin Jumat di masjid, sosialisasi anti-radikalisme dan terorisme, pertanian terpadu, wirausaha, pasar murah, siswa mengenal nusantara, dan upacara bendera pada peringatan hari besar nasional.	Olahraga bersama kelompok radikal dan warga, pemberdayaan ekonomi eks napiter, bina karang taruna JAD, bina majelis <i>ta'lim</i> ibu-ibu kelompok radikal, bina keluarga DPO kelompok radikal.	TMMD pembangunan fisik (musholla, jalan, gorong-gorong, jembatan) dan non-fisik (penyuluhan bela negara, tani, kesehatan, Kamtibnas, narkoba, hukum, ISIS, imunitas radikalisme). Rusunawa ponpes, bor air, sosmas sarana ibadah, beasiswa, sarana prasarana umum, pelayanan air bersih.
<b>SULAWESI TENGAH</b>	Elektrifikasi, siswa mengenal nusantara, pelatihan vokasional, beasiswa, pembuatan MCK, Al-Qur'an, pertanian terpadu, wirausaha, diklat moderasi beragama, workshop deteksi dini radikalisme, moderasi Islam milenial, bantuan psikososial korban terorisme, fasilitasi kompensasi dan medis korban,	Fasilitasi KTP eks narapidana terorisme (napiter), pendidikan Paket C eks napiter, olahraga bersama kelompok radikal dan warga, rekreasi bersama keluarga eks napiter kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur), fasilitasi kunjungan keluarga DPO MIT,	Penerangan Jalan Umum (PJU), Pembagian Al-Qur'an, Rusunawa pondok pesantren, bantuan panti asuhan, sosmas sarana ibadah, beasiswa, sarana prasarana umum.

	Pendidikan <b>KONTRA RADIKAL</b>	Deradikalisasi	Ekonomi -Sosiokultural - Politik <b>SARANA KONTAK</b>
	forum anti radikalisme dan terorisme, bantuan buku Islam moderat, dan konsolidasi pelopor perdamaian.	bina eks napiter, bina Imam dan Takmir pelopor perdamaian.	
<b>JAWA TIMUR</b>	Buletin jumat, seminar kebangsaan, konsolidasi pondok pesantren, forum anti-radikalisme dan terorisme, infografis kontra propaganda pendanaan terorisme, diklat moderasi beragama, festival seni keagamaan Hindu, fasilitasi kompensasi dan medis korban terorisme, siswa mengenal nusantara.	Bina dan pengawasan eks napiter, pendampingan JAD, beasiswa keluarga eks napiter.	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Jaringan gas bumi rumah tangga, layanan air bersih (daerah sulit dan pondok pesantren).

Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2019)

Data masyarakat umum di wilayah sasaran program kontra radikalisme juga mengukur persepsi warga terhadap pemerintah, baik pada warga yang terpapar dan tidak terpapar radikalisme. Hasil yang diperoleh adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada sebagian besar *item* yang mengukur kepuasan terhadap pemerintah pada kelompok terpapar radikal maupun tidak. Kelompok target program sinergisitas yang dijalankan masih memiliki persepsi positif terhadap pemerintah.

**Tabel 6**  
**Persepsi masyarakat target program pencegahan radikalisme terorisme**  
**sinergisitas kementerian lembaga**

No	Sikap terhadap Pemerintah	Tidak Terpapar N = 353	Terpapar Radikal N = 254	t	p
1	Seberapa Anda percaya dengan pemerintah saat ini? (1 = Sangat Tidak Percaya, 7 = Sangat Percaya)	4.46	4.56	-.73	.47
2	Seberapa adil pemerintah saat ini? (1 = Sangat Tidak Adil, 7 = Sangat Adil)	4.13	4.37	-1.83	.07
3	Seberapa amanah pemerintah saat ini? (1 = Sangat Tidak Amanah, 7 = Sangat Amanah)	4.16	4.36	-1.62	.11
4	Seberapa puas Anda dengan kinerja presiden saat ini? (1 = Sangat Tidak Puas, 7 = Sangat Puas)	4.48	4.44	.33	.74
5	Seberapa puas Anda dengan kinerja gubernur saat ini? (1 = Sangat Tidak Puas, 7 = Sangat Puas)	4.27	4.59	-2.48*	.01
6	Seberapa besar Anda merasa terbantu oleh pemerintah? (1 = Sama Sekali Tidak Terbantu, 7 = Sangat Terbantu)	4.40	4.54	-1.12	.26
7	Dibandingkan dengan kondisi hidup pada pemerintah sebelumnya, bagaimana kondisi hidup Anda saat ini? (1 = Lebih Buruk, 7 = Lebih Baik)	4.58	4.52	.44	.66
8	Dibandingkan dengan kondisi hidup pada pemerintah sebelumnya, bagaimana kondisi hidup masyarakat di daerah Anda saat ini? (1 = Lebih Buruk, 7 = Lebih Baik)	4.45	4.56	-.82	.42
9	Kepuasan pada Pemerintah (mean 8 item)	4.36	4.49	-1.28	.20

Secara umum, dapat dilihat, bahwa kedua kelompok memiliki kepuasan yang sama (berkisar pada poin 4 pada skala 1 hingga 7). Tidak ada perbedaan *mean* 8-item kepuasan pada pemerintah, antara mereka yang terpapar dan tidak ( $t(1, 605) = -.73, p > .05$ ). Kedua kelompok sama-sama percaya pada pemerintah, melihat pemerintah adil, amanah, puas dengan kinerja Presiden, terbantu oleh pemerintah, mempersepsi, bahwa kondisi hidup diri dan masyarakat sekitarnya membaik, namun pada derajat yang tidak berbeda secara signifikan. Satu-satunya perbedaan signifikan terdapat pada kepuasan pada kinerja Gubernur, ( $t(1, 605) = -2.48, p < .05$ ). Mereka yang terpapar ideologi radikal merasa lebih puas dengan kinerja Gubernur (4.59) dibandingkan yang tidak terpapar (4.27). Hal ini menjelaskan, bahwa masyarakat di wilayah yang menjadi sasaran program sinergisitas cenderung memiliki sikap positif terhadap pemerintah. Dari kenyataan ini dapat diartikan, bahwa program sinergisitas dipersepsi secara positif oleh kelompok yang terpapar dan tidak terpapar, secara khusus memberikan dampak yang lebih kuat pada kelompok terpapar.

Kelompok yang terpapar ideologi radikal, atau aksi radikal, seringkali dilandasi oleh ketidakpuasan pada kinerja pemerintah, kegagalan kepengurusan negara, atau keluhan-keluhan politik. Mengaca pada data ini, mereka yang menjadi target program sinergisitas (terpapar ideologi radikal eks-teroris, jaringan radikal) ternyata sama puasnya dengan mereka yang tidak terpapar ideologi radikal, bahkan merasa puas dengan kinerja pemerintah daerah (Gubernur). Ini adalah indikasi bahwa program sinergisitas cukup efektif untuk membuat mereka yang terpapar ideologi radikal merasa puas dengan kinerja pemerintah, secara spesifik mereka yang terpapar cenderung puas dengan kinerja Gubernur.

## d. Implementasi, Hambatan, dan Kendala Pelaksanaan Program Pencegahan ekstremisme-Kekerasan

Sejauh ini, program *preventing violent extremism* (PVE) di Indonesia telah meliputi hampir keseluruhan pilar dan fokus yang tercantum dalam RAN PE. Penelitian ini telah mengidentifikasi keterlibatan dari 52 lembaga yang terdiri dari empat lembaga pemerintah, sembilan lembaga internasional, serta 39 CSO (*civil society organization*) dan lembaga riset lainnya yang telah melaksanakan 144 program. Program-program yang telah dilaksanakan tersebut telah sesuai dan merupakan turunan dari berbagai kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maupun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Beberapa undang-undang terorisme ini menyediakan dasar hukum bagi lembaga pemerintah, seperti BNPT ataupun lembaga lain untuk bertindak dalam melawan potensi adanya ekstremisme kekerasan di Indonesia. Selain itu, dasar hukum lain seperti Peraturan Presiden no. 18 tahun 2014 juga merupakan salah satu contoh kebijakan yang mendukung pelaksanaan program PVE, kebijakan ini merupakan hasil program advokasi kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan anak. Di samping itu, RAN PE yang akan segera diimplementasikan juga merupakan langkah konkret yang menyediakan kerangka untuk penyusunan dan pelaksanaan program-program PVE, yang saat

ini dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, internasional, maupun CSO.

Kementerian/Lembaga dari pihak pemerintah juga sudah mencanangkan suatu kebijakan untuk melaksanakan program pencegahan radikalisme dan terorisme, yang merupakan program sinergisitas 36 Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi BNPT. Seperti telah dijelaskan, terdapat berbagai program pencegahan radikalisme dan terorisme yang telah dijalankan berfokus di tiga wilayah sasaran Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur, merupakan program-program dalam domain: 1) Bantuan pembangunan fisik; 2) Pemberdayaan ekonomi; 3) Bantuan pendidikan, beasiswa, buku; 4) Penguatan wawasan kebangsaan; dan 5) Moderasi beragama. Dampak dari program PVE yang telah dijalankan ini telah berhasil meningkatkan persepsi positif masyarakat yang menjadi kelompok target PVE terhadap pemerintah.

Meskipun demikian, masih terdapat *gap* berupa hambatan serta kendala dari pelaksanaan program PVE di lapangan. Penjelasan terkait masalah ini akan dibahas dalam sub-bab berikut. Kendala yang dibahas mencakup kendala spesifik untuk pelaksanaan program di setiap bidang maupun secara umum.

## 1. Kendala Bidang Pendidikan

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program di bidang pendidikan adalah **sensitivitas isu yang dibahas**. Radikalisme dan terorisme merupakan isu yang dinilai kuat muatan politisnya. Hal ini menyebabkan dalam banyak kasus lembaga CSO sulit memperoleh izin untuk melakukan kegiatan yang bertemakan

PVE. Sebagai sekadar contoh, ada pihak kampus yang masih kurang kooperatif dalam mendukung pelaksanaan program PVE. Padahal, program-program PVE cukup penting untuk dilaksanakan di kampus-kampus, karena beberapa penelitian telah menunjukkan, bahwa radikalisme banyak menyasar kelompok usia muda dan beberapa kampus telah terindikasi terpapar paham-paham radikalisme.

Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di sekolah-sekolah. Kendala untuk program PVE di bidang pendidikan yang melibatkan sekolah-sekolah biasanya juga terkait dengan penolakan dari pihak sekolah, salah satunya dengan alasan terlalu banyak kegiatan siswa di sekolah. Hal ini dapat dipahami, karena banyaknya lembaga yang terlibat di isu ini khususnya pencegahan di bidang pendidikan, menyebabkan sekolah maupun institusi pendidikan biasanya memperoleh beberapa program dari beberapa lembaga, sehingga tidak semua program dapat dilaksanakan. Dalam hal ini dukungan dari pihak sekolah, melalui Kepala Sekolah sebagai pengambil keputusan, juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari program-program yang dilaksanakan. Bagi beberapa sekolah dengan Kepala Sekolah yang menyadari pentingnya program PVE, biasanya pihak sekolah akan memberikan dukungan dengan memberikan ruang dan waktu yang diperlukan untuk implementasi program. Beberapa sekolah lainnya, khususnya yang Kepala Sekolahnya yang memandang kurang pentingnya masalah ini, atau kurang sepekat dengan adanya ancaman dan bahaya radikalisme di sekolah-sekolah, maka program yang telah disiapkan oleh pihak-pihak eksternal akan lebih sulit dijalankan di institusi pendidikan. Di sini, birokrasi lembaga pendidikan yang bersifat hierarki dapat menghambat implementasi dari program yang ingin dilaksanakan.

## 2. Kendala Bidang Internet dan Media Sosial

Salah satu kendala dalam melaksanakan program di bidang ini adalah **belum adanya narasi kontra radikalisme yang dikomunikasikan secara sistematis dan terukur**. Pembuatan konten-konten yang melibatkan kontra-narasi (*counter-narrative*) masih terbatas dan cenderung kurang beragam serta dilakukan secara sporadis, sehingga tidak ada koherensi antar narasi yang dibangun. Hal ini menunjukkan, bahwa program kontra-narasi melalui internet dan media sosial masih belum diketahui efektivitasnya. Selain itu sasaran dari pesan kontra-narasi belum *targeted*, artinya belum dilakukan strategi untuk narasi khusus untuk kelompok yang spesifik. Masalah ini menjadi penting, karena kelompok ekstremis justru secara masif menggunakan internet dan sosial media tidak hanya untuk propaganda melainkan juga rekrutmen yang bersifat *targeted*.

Selain melakukan kontra-narasi melalui internet dan media sosial, sejumlah aktor juga melakukan pemetaan data *online* dengan menggunakan *machine learning*. Dalam hal ini, seringkali pemetaan yang dilakukan masih terbatas, belum sampai pada kemampuan membaca sentimen positif atau negatif di media sosial, banyak *coding* dilakukan secara manual. Ini menyebabkan keterbatasan dalam mengelola data dan bias isu. Selain itu, *coding* data naratif yang bersifat konstruksi sosial membutuhkan pengetahuan konseptual dan interpretasi yang tepat, sehingga dalam hal ini, bukan hanya kompetensi IT yang diperlukan untuk mengolah data dengan mesin, namun juga ketersediaan para ahli di bidangnya untuk analisis dan interpretasi. Kedua isu ini menjadi penting untuk efektivitas kampanye kontra-narasi di internet dan media sosial dalam pencegahan ekstremisme-kekerasan.

Satu hal yang juga penting digarisbawahi dalam program kontra-narasi adalah kerja sama antar media. Kerja sama dapat membantu menguatkan fokus program dan target. Diperlukan narasi yang berbeda untuk beberapa kelompok target yang berbeda level keterpaparan ideologinya. Aktor-aktor yang aktif menggunakan kanal media *online* perlu saling bekerjasama, bukan hanya dalam rangka meningkatkan kreativitas, tetapi juga efektivitas pesan, secara kualitas konten, seperti pesan yang tepat sasaran dan sesuai, serta secara kuantitas, terkait eksposur yang terukur dan berkesinambungan. Hal ini penting untuk diperhatikan, agar setiap kampanye propaganda anti ekstremisme-kekerasan ini konten-kontennya dapat selalu selaras dan saling menguatkan, termasuk menguatkan narasi tunggal kontra radikalisme terorisme.

Terakhir terkait kendala teknis, yaitu kendala keterbatasan teknis dalam menjalankan program-program di bidang ini. *Pertama*, menjalankan program PVE di bidang internet dan media sosial membutuhkan kapabilitas teknis –terkait IT, yang cukup tinggi. Beberapa aktor mengalami keterbatasan dalam hal ini, sehingga tidak dapat membuat program berkelanjutan di bidang ini. *Kedua*, kendala juga muncul dari mahalnya biaya operasional yang diperlukan, misalnya untuk *crawling* data. Agar dapat mengumpulkan data yang cukup dalam menjalankan suatu program, maka perlu melakukan *data mining* dengan biaya yang tidak sedikit, sehingga beberapa aktor juga kesulitan untuk menjalankan hal ini. *Ketiga*, keterbatasan koneksi internet di Indonesia pada beberapa daerah. Hal ini membatasi kemampuan aktor untuk menyebarkan programnya melalui internet ke wilayah-wilayah yang masih lebih terbelakang terkait konektivitas internetnya. *Keempat*, kurangnya kapabilitas

aktor-aktor untuk memerangi narasi kontra dari kelompok ekstrem. Padahal, dalam bidang ini, sangat penting untuk melakukan kegiatan secara ‘maraton’ dalam membanjiri internet, dengan pemahaman-pemahaman Islam moderat, untuk melawan narasi kontra tersebut. Sejauh ini, konten untuk narasi moderat dirasa masih kurang, terutama dari aspek *influencer* (misalnya *ustadz*) maupun kreativitas bentuknya.

### 3. Kendala Bidang Deradikalisasi

Pada bidang deradikalisasi, salah satu kendala utama yang dihadapi **adalah resistensi dan penolakan dari orang-orang yang menjadi target program.** Beberapa program kurang berhasil dijalankan secara efektif, karena banyak narapidana terorisme (*napiter*), khususnya yang kategori *hardcore*, menolak mengikuti program deradikalisasi. Jika pun bukan dari kelompok ideolog, mereka juga perlu didekati dengan pendekatan khusus. Intervensi deradikalisasi yang menggunakan pendekatan *counter-ideology* paling berisiko menimbulkan respon *backlash* dari *napiter*. Hal ini disebabkan ideologi bersifat *motivated*, atau termotivasi untuk divalidasi secara terus-menerus. Oleh karena itu, melakukan *counter ideology* secara langsung akan membuat yang bersangkutan merasa tidak nyaman, karena meningkatkan *self-uncertainty*, yang rentan dimiliki oleh kaum ekstremis. Kondisi ini menuntut program deradikalisasi harus berhasil mengatasi masalah substansi materi program, yang secara praktek maupun teoritis, masih terus dieksplorasi secara terus-menerus. Hingga hari ini, belum ada satu program deradikalisasi di dunia ini yang dapat dibuktikan efektif untuk semua konteks. Akibatnya, dapat

dipahami, bahwa aktor PVE dalam domain ini masih terbatas, karena tantangan dari program deradikalisasi, yang menysasar langsung kelompok ekstremis radikal membutuhkan waktu panjang, banyak menyedot tenaga serta pemikiran yang banyak khusus di area ini, dan juga dana yang tidak sedikit.

Kendala lainnya adalah terkait akses terhadap kelompok ekstremis-kekerasan secara langsung. Disebabkan adanya isu keamanan, akses terhadap kelompok ini sangat terbatas. Diperlukan pemahaman terkait *network* bagi masyarakat sipil, agar dapat masuk ke dalam lingkaran mereka, atau dukungan otoritas untuk melakukan kontak langsung dengan kelompok ini. Jika pun dapat dilakukan, pengalaman kontak langsung dengan kelompok atau anggota kelompok ekstremisme-kekerasan memiliki risiko yang cukup besar, terkait keamanan, secara fisik maupun psikologis. Tidak sedikit *intervensionis* yang mengalami teror fisik dan psikis, beberapa orang dari antara mereka, bahkan teridentifikasi berhasil direkrut oleh kelompok ini. Keterbatasan akses ini dapat diatasi, dengan melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah. Selain dapat berguna untuk membuka akses juga dapat melindungi para *intervensionis* dari ancaman fisik yang mungkin ditujukan kepada mereka. Hal yang juga penting, koordinasi dengan pemerintah untuk program deradikalisasi pada kelompok ekstremis-kekerasan, dapat mengurangi risiko *backlash* dan ketidakselarasan antar program yang dapat berakibat kontra produktif dalam program deradikalisasi. Disebabkan narasi ekstremisme adalah narasi tunggal yang kuat, untuk memoderasinya diperlukan narasi tunggal yang solid dengan menghindari inkonsistensi maupun disonansi dalam narasi kontra yang diberikan.

Selain itu, beberapa mantan napiter juga menolak secara terang-terangan untuk mengikuti program serta tidak bersedia untuk membuka ruang diskusi. Program yang melibatkan keluarga napiter atau mantan napiter pun, seringkali membutuhkan waktu dan pendekatan yang cukup lama, untuk meyakinkan mereka agar bersedia mengikuti program yang akan dijalankan. Bagi mantan napiter yang mengikuti program pun, terdapat kesulitan untuk menjaga agar napiter tidak kembali ke jalur radikalisme dan ekstremisme mereka. Eks-napiter tentu memiliki risiko yang tinggi untuk kembali menjadi teroris dan ekstremis. Dikarenakan peran agama yang kuat dalam hidup mereka, eks-napiter selalu memiliki kesempatan untuk, baik sengaja maupun tidak sengaja, mendengarkan ceramah-ceramah radikal. Jika mereka terus-menerus terpapar ceramah tersebut, maka mereka akan *relapse* menjadi ekstrimis lagi. Hal ini menunjukkan, bahwa program kontra-radikalisme untuk kelompok terpapar di tengah masyarakat, membutuhkan upaya yang jauh lebih besar, karena area dan potensi infeksi yang jauh lebih luas. Menggunakan pendekatan ekologis, program deradikalisasi di masyarakat dapat berfokus pada meningkatkan faktor penarik di masyarakat, seperti kerentanan sosial politik dan ekonomi, serta menurunkan faktor pendorong internal, seperti motivasi identitas dan peran bermakna. Berdasarkan kenyataan ini, maka proses deradikalisasi membutuhkan kesinambungan program, secara terus-menerus dalam jangka waktu yang tertentu. Karena, masalah ideologi tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu dua program saja.

#### 4. Kendala Bidang Kebijakan

Kendala yang terjadi di bidang kebijakan salah satunya adalah **periode masa jabatan yang cukup singkat dan mutasi** di Kementerian/Lembaga di Indonesia. Hal ini seringkali mempersulit advokasi hukum yang dilakukan ke pemerintah dan Kementerian/Kelembagaan terkait, khususnya terkait kesinambungan pesan, karena adanya perubahan jajaran kepemimpinan. Perubahan ini tidak diikuti oleh skema alur informasi yang baik, sehingga menyebabkan advokasi sebelumnya yang sudah diberikan menjadi diskontinyu, dan harus dilakukan dari awal lagi. Kesulitan lain adalah masalah birokrasi, seperti panjang dan berbelit-belitnya urusan birokrasi dalam menjalankan program-program oleh CSO, ditambah tidak adanya kepastian serta informasi yang cukup jelas terkait proses yang harus dilalui. Disebabkan masih banyak interpretasi aturan dan kebijakan, yang secara parsial masih banyak dilakukan oleh petugas di lapangan.

Selain masalah koordinasi dan administrasi, masalah substansi terkait advokasi kebijakan juga ditemukan di lapangan. Hal ini dapat diamati dari kurang jelasnya terminologi-terminologi yang digunakan dalam topik ekstremisme-kekerasan, yang menjadi salah satu faktor yang mempersulit advokasi kebijakan. Hingga sekarang, misalnya, masih belum ada dasar hukum yang dapat mendefinisikan secara pasti tentang terminologi-terminologi yang digunakan dalam program-program PVE. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pendefinisian yang baku, agar dapat dijadikan acuan, sehingga tidak ada kesulitan lagi dalam melakukan pembatasan dan indikator dari program-program yang hendak dijalankan. Perlunya definisi dan pembatasan yang jelas secara hukum akan dapat membantu

para aktor menyusun indikator dan evaluasi dampak dari program, sehingga dapat terus ditingkatkan akurasi dan efektivitasnya di lapangan.

## **5. Kendala Sinergi antar Aktor**

Secara umum, kendala yang terjadi di sini adalah kurangnya kerja sama dan sinergisitas antar pihak dalam menjalankan program-program PVE. Masih terdapat kelemahan koordinasi dan kerja sama antar CSO dalam menjalankan program-program mereka. Hal ini dapat diidentifikasi dari adanya beberapa CSO yang menyatakan, bahwa terdapat tumpang-tindih program yang dijalankan antar CSO satu dengan yang lainnya. Biasanya, dalam mengatasi isu yang sama di wilayah yang sama, hal yang terjadi adalah para CSO ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Sayangnya, pendekatan yang berbeda-beda ini berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi, sehingga tidak sinkron, akibatnya program kurang efektif, bahkan mungkin terjadi kontra produktif satu sama lain dalam perjalanan program. Padahal, beberapa program ini memiliki tujuan yang kurang lebih serupa. Apabila program-program seperti ini dapat dikoordinasikan antar CSO, maka akan diperoleh peningkatan efektivitas dan efisiensi program, sehingga diharapkan memperoleh hasil yang lebih baik.

Di samping itu, terdapat juga persepsi, bahwa beberapa CSO kurang bersedia melakukan kerja sama. Hal ini muncul biasanya dari fokus pendekatan yang berbeda. Beberapa CSO memiliki pendekatan yang lebih akademis, sedangkan CSO lain memiliki pendekatan

yang lebih praktis. Kedua pendekatan ini, meskipun sebenarnya dapat saling melengkapi, namun pada akhirnya cenderung berjalan sendiri-sendiri, karena ketidakcocokan metode pendekatan. Hal ini menjadi salah satu penyebab lain mengapa kurang bisa terjadi kerja sama antar CSO.

Selain kerja sama antar CSO, masalah kerjasama juga terjadi antara pemerintah dan CSO dalam menjalankan program-program PVE saat ini. Hal ini dapat diamati dari beberapa kondisi berikut:

*Pertama*, pemerintah seringkali tidak melakukan *follow up* advokasi kebijakan, yang sudah diberikan oleh CSO. Hal ini mempersulit sinergi dengan aktor lain, seperti CSO yang memerlukan kejelasan sikap dari pemerintah.

*Kedua*, tidak adanya *follow up* terhadap rekomendasi yang diberikan oleh CSO. Hal ini menjadikan riset atau program yang sudah dijalankan oleh CSO menjadi kurang berdampak, karena tidak ditindaklanjuti.

*Ketiga*, pemerintah dinilai kurang serius dalam menginterpretasi data yang diberikan oleh CSO. Hal ini menjadi *gap* penyaluran informasi antara CSO dan pemerintah. Hilangnya informasi dari kendala ini menjadikan program yang telah dijalankan juga tidak ditindaklanjuti.

*Keempat*, pemerintah dinilai kurang transparan dalam memberikan informasi terkait program PVE dan evaluasinya, sehingga menyulitkan sinergi antara CSO dengan pemerintah. CSO memerlukan informasi-informasi yang lengkap, agar dapat merencanakan dan mengimplementasikan program-program PVE dengan lebih efektif.

Adanya kendala ini membatasi ruang gerak para CSO, sehingga program-program tidak dapat dijalankan dengan optimal.

*Kelima*, kesulitan CSO untuk menembus birokrasi dan mendapatkan audiensi dari pihak pejabat pemerintah yang diperlukan. Birokrasi yang lama, hierarkis, dan berbelit-belit membuat pelaksanaan program menjadi terulur.

*Keenam*, terakhir, CSO dalam berbagai kasus mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan beberapa pemegang jabatan untuk mendapatkan *feedback* langsung untuk tujuan pelaksanaan maupun tindaklanjut program.

## **e. Kebijakan dan Program Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan dalam Konteks Demokrasi di Indonesia**

Di dalam menghadapi ancaman ekstremisme-kekerasan, diperlukan partisipasi masyarakat sipil secara aktif guna mendukung kerja pemerintah dalam mengimplementasikan RAN PE. Dapat ditunjukkan, bahwa program-program yang diidentifikasi dalam penelitian ini telah mencakup hampir seluruh pilar dan fokus yang ada dalam RAN PE. Terdapat beberapa gap dalam implementasi program ekstremisme-kekerasan, yang telah dilakukan selama lima tahun (2015-2019), yang secara rinci telah dijelaskan per bidang, yang juga meliputi hambatan dan kendala serta rekomendasinya.

Berdasarkan pemetaan program-program PVE yang telah dilakukan, mayoritas dari program dan juga aktor yang terlibat, menggarap bidang pendidikan, yaitu sebanyak 49 program, yang dijalankan oleh 24 aktor. Fokus utama yang diletakkan di bidang pendidikan telah sesuai dengan tinjauan secara teoritis. Meskipun demikian, berdasarkan perspektif tahapan proses radikalisisasi dapat dijelaskan, bahwa arah kebijakan dan program pencegahan di tahapan pra radikalisisasi belum sepenuhnya menysasar kelompok target, khususnya karena penentuan target belum berdasarkan *mapping* (identifikasi) keterpaparan ideologi radikal. Penentuan kelompok target dalam program pencegahan menysasar kelompok rentan, remaja dan perempuan, serta kelompok spesifik lainnya, yakni korban bom.

Dapat dijelaskan, bahwa secara umum pada tahap pra-radikalisme, program yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah menysasar populasi umum, namun belum secara spesifik membedakan jenis intervensi untuk kelompok rentan dan tidak rentan. Kelompok rentan yang dimaksud, meliputi: kelompok usia muda, yang berada dalam ekosistem yang berisiko, baik dari kelompok maupun keluarga, atau kelompok yang berada di wilayah zona 'merah' penyebaran ideologi radikal, kelompok yang berada dalam ekosistem sosial yang mendukung ideologi ekstrem, seperti *foreign fighter terrorism* dan keluarganya. Selama ini program yang dilaksanakan belum secara jelas menerapkan intervensi spesifik untuk target yang berbeda-beda tersebut, khususnya kontra narasi melalui media sosial dan internet.

Perlunya membedakan target, juga didasarkan atas asumsi, bahwa pada kelompok rentan yang telah terpapar ideologi radikal, program

kontra radikalisme berpotensi *backlash*, dan menguatkan resistensi terhadap kontra radikalisme. Beberapa program kontra narasi yang dilakukan yang mengusung tema keberagaman dan toleransi, direspons dengan narasi kontra yang kurang mendukung tujuan program, seperti: narasi toleransi kebablasan, kriminalisasi ulama, pendzoliman terhadap umat Islam, pembatasan ibadah, semuanya adalah contoh dari narasi resistensi yang dapat disebabkan oleh program kontra narasi yang belum *targeted* secara bertahap. Kondisi ini dapat berakibat pada resistensi yang lebih kuat terhadap berbagai program pencegahan terorisme di Indonesia. Kondisi ini rentan dimanfaatkan oleh kepentingan politik kelompok-kelompok radikal.

Dalam konteks negara demokrasi, kelompok ekstremis radikal memperoleh peluang untuk menggunakan hak politiknya dalam menyampaikan aspirasi, serta dapat memanfaatkan keterbukaan dari sistem demokrasi yang mengakomodasi partisipasi dari setiap kelompok warga negara. Pembatasan aspirasi dari kelompok ini oleh pemerintah justru berpotensi memunculkan narasi perlawanan yang lebih keras, yang juga menggunakan argumen demokrasi. Oleh Karena itu, dalam hal ini penting untuk mengantisipasi *backlash* dalam kampanye anti propaganda ekstremisme, radikalisme dan terorisme, dengan menguatkan narasi tunggal yang solid untuk diturunkan berdasarkan target kampanye narasi yang lebih spesifik.

Di lain pihak, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dapat dijelaskan, bahwa semua program pencegahan ekstremisme–kekerasan yang sudah dilakukan –baik oleh masyarakat maupun pemerintah, sudah sesuai dengan kerangka dari RAN PE yang juga telah direview

oleh lembaga terkait menyangkut aspek HAM dan kewenangan pemerintah serta sudah mengakomodasi partisipasi masyarakat. Berdasarkan pilar RAN PE, program-program yang dilakukan telah menunjukkan kebersesuaian dengan masing-masing pilar, yaitu pilar 1: Pencegahan (Kesiapsiagaan, kontra radikalasi, perlindungan) juga sangat dominan, yaitu sebanyak 97 program. Hal ini juga sejalan dengan fokus utama yang sebaiknya diadopsi, yaitu: bagaimana mencegah warga Indonesia untuk mengadopsi ideologi-ideologi ekstrim dan mengurangi paparan-paparan ekstremisme.

Program-program pencegahan ekstremisme-kekerasan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat menasar langsung kelompok target baik di level individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Meskipun demikian, program-program tersebut dilaksanakan oleh berbagai lembaga secara terpisah. Koherensi program dan kesinambungannya masih menjadi masalah, karena belum terkoordinasinya seluruh program dalam satu wadah yang terlembaga. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya dampak program, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam hal ini pencegahan ekstremisme-kekerasan tidak dapat dipisahkan dari proses politik yang bekerja di negara ini. Di satu sisi program pencegahan ekstremisme-kekerasan terus berjalan, di sisi lain intoleransi politik yang mengarah kepada radikalisme terus menguat melalui polarisasi.

Sebagai negara demokrasi –yang menjamin hak setiap warga negara dalam beragama dan menjunjung tinggi keberagaman, maka sudah selayaknya setiap warga negara Indonesia perlu menjunjung tinggi sikap toleransi dan anti-diskriminasi. Dalam hal ini sebagian besar

program PVE yang dijalankan sudah fokus untuk memberikan penguatan komitmen terhadap NKRI dan proses demokrasi. Menjaga kesinambungan program akan sangat bermanfaat dalam menjaga proses demokrasi di Indonesia, khususnya dalam menguatkan sikap moderasi untuk menghadapi kelompok-kelompok ekstremis dan menolak praktek intoleransi antar umat beragama, diskriminasi sesama warga negara dan politik golongan yang mengesampingkan keberagaman. Narasi kontra radikalisme yang kuat dan didukung semua komponen bangsa, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk terus diproduksi dan disebarluaskan secara masif. Ini adalah hal yang mendesak untuk dilakukan, agar dapat mendukung upaya yang berkesinambungan dalam memitigasi risiko munculnya bibit-bibit radikal di masyarakat, dengan menguatkan daya tahan eksternal.

Perlu digarisbawahi kembali, bahwa proporsi pelaksanaan program berdasarkan pilar pencegahan dalam program-program PVE tidak hanya tinggi di bidang pendidikan saja, namun juga di bidang internet dan media sosial. Hal ini juga telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan program, agar sesuai dengan perkembangan gerakan ekstremisme-kekerasan dalam sepuluh tahun terakhir. Kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi di satu pihak memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan manusia di masa sekarang, di pihak lain memunculkan dampak negatif yang harus secara terus-menerus diwaspadai. Dalam konteks pencegahan ekstremisme-kekerasan, peran teknologi informasi tidak dapat diabaikan. Beberapa program yang telah dilaksanakan dalam ranah ini, dapat dikatakan, sudah mengantisipasi ancaman radikalisme melalui internet.

Kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran radikal disediakan oleh internet dan jaringan media sosial. Komunikasi yang terjalin di ranah ini juga memudahkan adanya proses indoktrinasi yang dijalankan oleh para ekstremis terhadap masyarakat rentan. Oleh sebab itu, peran para aktor dalam menjalankan PVE di bidang ini sangat penting dalam memerangi narasi-narasi ekstremisme-kekerasan, yang dapat memudahkan kelompok rentan untuk terpapar dan terdampak dalam paham-paham ekstrimis. Kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh para aktor, baik dari segi teknis maupun dari segi biaya, menjadi hambatan dalam menjalankan program di bidang ini, secara efektif dan efisien. Selain itu, kebijakan yang ada dalam mendukung bidang ini masih dirasa kurang oleh para aktor. Menjalankan program PVE di bidang digital perlu untuk melakukan kegiatan masif, yang bersifat *sprint* dan *marathon* di waktu yang bersamaan, guna memenangkan perang *keyword* melawan pihak-pihak yang menyebarkan konten ekstremisme-kekerasan, sehingga untuk itu dibutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Dari hasil penelitian yang sudah didapatkan dapat dikatakan, bahwa hingga saat ini, para aktor masih merasakan kesulitan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan.

Tidak adanya sumber daya dan struktur yang jelas juga membuat program-program di bidang ini kemudian dilaksanakan secara sporadis, tanpa arah yang jelas dan tidak selaras. Konten-konten yang ditampilkan terkesan berdiri sendiri-sendiri, sehingga kontra-narasi terhadap ekstremisme-kekerasan dari para aktor ini tidak dapat dibangun secara komprehensif dan utuh. Beberapa program PVE di ranah ini masih cenderung hanya sebatas melakukan *posting* di web maupun media sosial, tentang kegiatan atau program yang telah

dilakukan. Komunikasi jenis ini kurang mendukung pembangunan kontra-narasi yang baik dalam memerangi paham ekstremisme-kekerasan, karena tidak memenuhi kaidah konsistensi dan kepastian pesan tunggal yang kuat, namun justru berpotensi memunculkan ketidakselarasan antar konten yang dibangun, baik *intra* maupun *inter-actor*. Dalam hal ini, pengaturan konten informasi oleh pemerintah justru berpotensi melanggar kebebasan berpendapat, sehingga salah satu cara terbaik dalam hal ini adalah menguatkan narasi tunggal kontra radikalisme, yang koheren antara pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, seperti yang telah dijelaskan pada bagian hasil penelusuran sebelumnya, bahwa program yang masih terbatas adalah program pada bidang deradikalisasi. Hanya terdapat 14 program yang dijalankan, dengan 10 aktor terlibat, yang berhasil diidentifikasi dalam penelitian ini. Padahal, upaya pencegahan tidak memadai, jika hanya berfokus pada kelompok yang belum terpapar. Kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini, adalah masih terdapat napiter dan mantan napiter dalam jumlah yang tidak sedikit, maka program yang diarahkan pada peningkatan resiliensi masyarakat umum terhadap radikalisme dan terorisme diperlukan untuk menguatkan daya tahan masyarakat. Selain itu, kondisi masyarakat yang kondusif akan dapat meningkatkan peluang keberhasilan integrasi ekstrimis ke dalam masyarakat. Hal ini sangat menuntut adanya program deradikalisasi yang kuat dan efektif, hanya saja masih terlalu sedikit aktor yang fokus pada bidang ini, karena masalah keterbatasan akses dan belum optimalnya koordinasi pihak CSO yang terlibat dengan pemerintah.

Dalam hal ini, pemerintah cenderung menggunakan pendekatan sentralistik yang mengarah pada pembatasan akses ke kelompok khusus, yakni ekstremis. Persoalan ini dapat dipahami, karena tak dapat dipungkiri, bahwa pemecahan masalah terorisme memerlukan pendekatan *hard approach*, yang berfokus pada keamanan dan tidak cukup hanya mengandalkan *soft approach* semata. CSO sebagai aktor yang berperan dalam mendukung program-program PVE hanya terbatas pada pendekatan *soft approach*, dan itu pun tidak sepenuhnya dapat memperoleh informasi atau pun akses yang dibutuhkan dalam melakukan program deradikalisasi pada kelompok target secara langsung, seperti di dalam Lapas, bahkan terkadang juga di luar Lapas. Sangat penting untuk mengatasi kendala-kendala ini apabila Indonesia ingin sepenuhnya terbebas dari bahaya ekstremisme-kekerasan. Akan tetapi, perlu dicatat di sini, bahwa pendekatan keamanan sering memunculkan masalah HAM dan *backfire effect*, yang tidak jarang bisa dijadikan dasar untuk melakukan perlawanan balik oleh kelompok ekstremis-kekerasan. Kekerasan dilawan dengan kekerasan. Untuk itu, pemerintah Indonesia sebagai negara yang juga menjunjung tinggi HAM, harus sangat berhati-hati dalam masalah ini, dan tidak dapat dipungkiri, bahwa strategi *soft approach* belum dijadikan pendekatan utama dalam pencegahan dan perang melawan ekstremisme-kekerasan di Indonesia.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa dalam implementasi kebijakan pencegahan ekstremisme-kekerasan, sudah cukup banyak aktor yang terlibat, baik dalam penyusunan kertas kebijakan, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah terkait penanganan PVE, maupun terlibat langsung di lapangan.

Permasalahan dalam bidang ini berada pada kurangnya sinergi antar CSO dan pemerintah dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang sudah dan perlu diambil di masa depan. Banyak aktor yang merasa, bahwa pemerintah masih kurang terbuka terhadap saran-saran yang diberikan, sehingga segala usaha mereka dalam melakukan advokasi kebijakan tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kurangnya rasa saling percaya antara pemerintah dan aktor non-pemerintah menjadi salah satu isu yang perlu diperbaiki di sini. Perlu adanya keselarasan pandangan antara pemerintah dan pihak non-pemerintah terkait arah kebijakan yang diambil dalam konteks PVE. Di samping itu, mengingat, bahwa terorisme dan radikalisme juga bukan hanya permasalahan di dalam negeri semata, namun juga merupakan permasalahan global, maka para pihak termasuk pemerintah dan CSO juga perlu untuk menjalin kerja sama yang melibatkan negara-negara lain.

Berdasarkan pemetaan, terdapat 14 program teridentifikasi dalam pilar penguatan kemitraan dan kerja sama internasional. Hal ini, harapannya di masa depan, masih dapat ditingkatkan lagi, terutama dalam bidang peningkatan kapasitas kemitraan para pemangku kepentingan serta monitoring dan evaluasi dari program yang dijalankan. Disebabkan ancaman ekstremisme-kekerasan pada abad 21 merupakan ancaman global, dan gerakan ekstremisme-kekerasan juga beroperasi secara lintas negara, maka kerja sama antar negara, khususnya wilayah regional perlu ditingkatkan dan dikuatkan. Porsi pendekatan keamanan sudah seharusnya menjadi porsi pihak pemegang otoritas, dalam hal ini pemerintah. Perlu kerja sama antar negara guna mengontrol aktivitas dan menjaga keamanan di setiap wilayah perbatasan, untuk membatasi mobilisasi fisik para aktivis

dari kelompok ekstremis, yang diidentifikasi beroperasi antar negara.

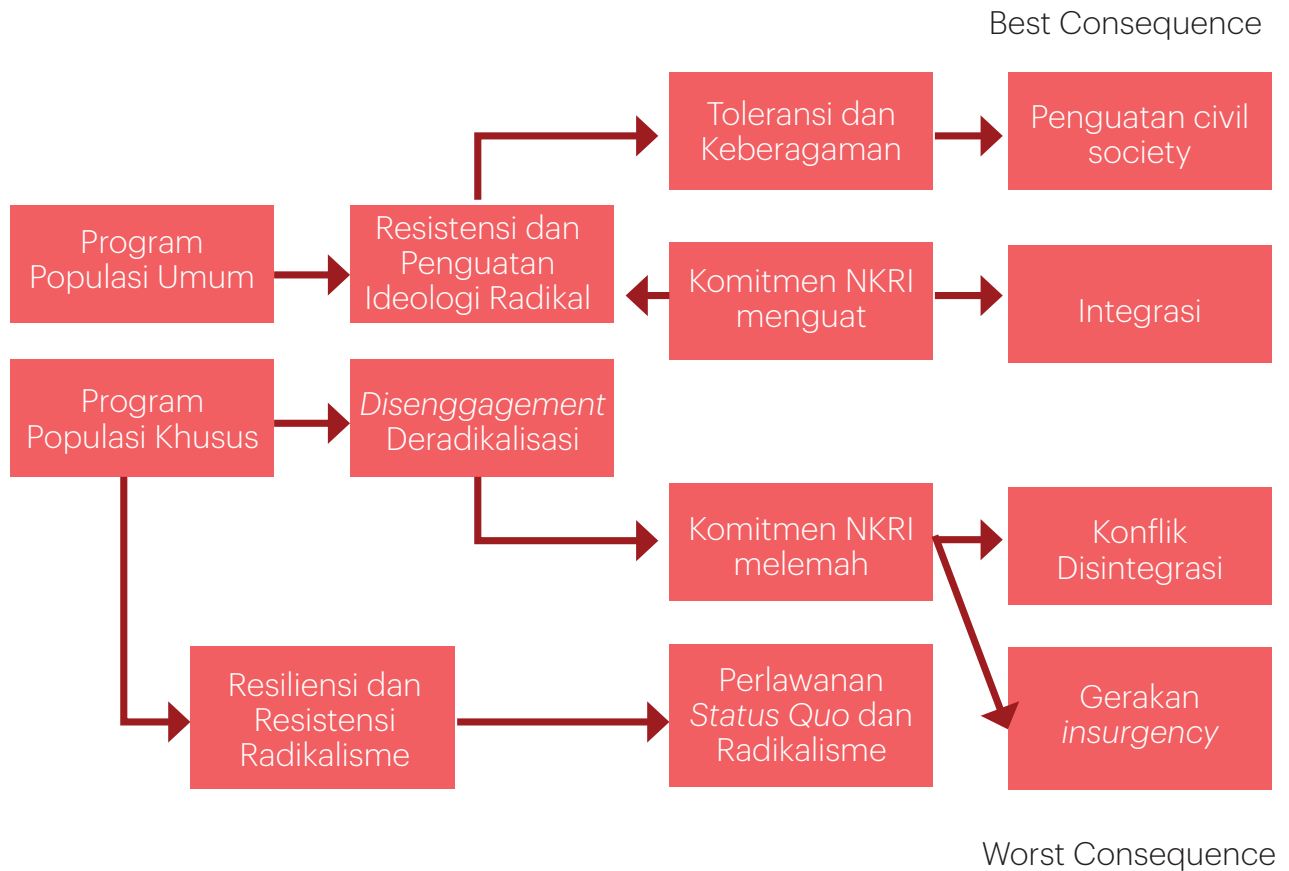
Selain keempat bidang yang telah dijelaskan, terdapat bidang lain seperti ekonomi–sosiokultural–politik, maupun riset-riset PVE yang secara umum sudah cukup mendapat perhatian dari banyak aktor PVE. Secara teoritis, faktor ekonomi, sosiokultural, dan politik merupakan faktor penarik bagi kelompok rentan. Paparan ekstremisme pada kelompok-kelompok yang lemah secara ekonomi dan yang tidak memiliki lingkungan sosial budaya yang mendukung sangat berisiko menyebabkan perubahan ideologi mereka ke arah ekstremisme-kekerasan. Oleh sebab itu, penguatan di kedua bidang ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sejauh ini, sudah ada aktor-aktor yang terlibat dan fokus pada bidang-bidang ini. Jumlah program dalam bidang-bidang ini juga sudah cukup banyak, sehingga penanganan untuk bidang-bidang ini sudah cukup kuat.

Berdasarkan hasil pemetaan program dan kebijakan ekstremisme-kekerasan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil, dapat ditunjukkan, bahwa fokus program sudah mengarah sesuai pilar RAN PE, yang melibatkan kelompok masyarakat secara luas. Di mana masyarakat sipil lebih banyak mengisi domain pencegahan pada populasi umum, dan pemerintah lebih banyak mengisi domain kebijakan deradikalisasi untuk populasi ekstrimis, yang aksesnya memang cenderung dibatasi. Domain yang masih perlu dieksplorasi pada program pencegahan kekerasan ekstremisme adalah internet dan sosial media. Di mana pada domain ini, dalam hal kontra-narasi diperlukan merancang pesan yang tepat sesuai sasaran dan efektif untuk meng-*counter* ideologi ekstrimis dan radikal, disebabkan

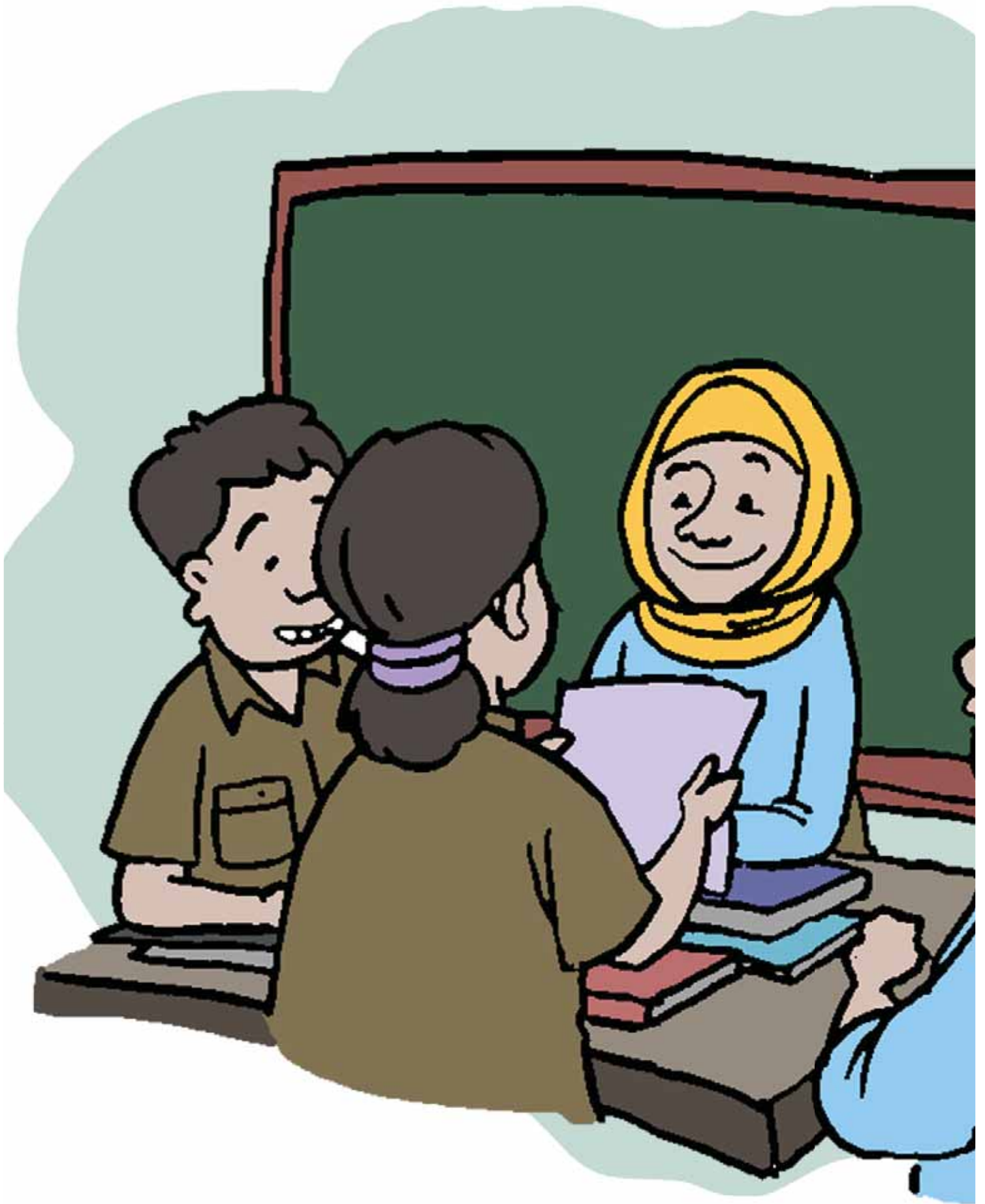
kelompok ekstrimis radikal sudah melakukan propaganda secara masif di internet. Selain itu, internet juga dapat dieksplorasi untuk program intervensi, baik dalam memoderasi ideologi maupun memitigasi perilaku ekstremis radikal –dari kelompok terpapar maupun non terpapar– secara lebih efektif. Selain itu, peningkatan kerja sama antara negara, baik dalam bidang: keamanan, ekonomi, sosial dan politik, khususnya dalam penanganan PVE, perlu terus dikuatkan, baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun oleh kelompok masyarakat, melalui organisasi-organisasi masyarakat yang telah memiliki jejaring antar negara.

## **f. Ekstrapolasi Model Analisis Kebijakan**

Berdasarkan hasil analisis gap permasalahan dan teoritis, selanjutnya akan dilakukan simulasi model analisis kebijakan menggunakan asumsi teoritis tahapan radikalisasi sebagai dasar penyusunan *model sequencial*. Metode yang digunakan adalah Metode Analisis Keputusan Cepat (*quick decision analysis*), yang dikembangkan dari pemikiran Robert D. Behn dan James W. Vaupel. Di sini Patton dan Savicky mengadopsi metode analisis keputusan cepat Behn dan Vaupel (1982).



Berdasarkan simulasi model yang dilakukan, terdapat dua hal penting yang harus tersedia untuk tercapainya tujuan dari program pencegahan ekstremisme-kekerasan secara umum, yaitu: komitmen NKRI dan penerimaan keberagaman/toleransi. Jika kedua kondisi tersebut tidak tersedia, maka negara demokrasi NKRI akan mengalami ketidakseimbangan, yang dapat berujung pada konflik dan disintegrasi. Sebaliknya jika kedua hal tersebut dapat tersedia, maka akan dapat menguatkan pembentukan politik partisipatif dan demokrasi di negara ini.



## BAB V

# SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, sejauh ini, maka saran dan rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

### 1. Pihak Pemerintah

- a. Menyamakan definisi mengenai beberapa terminologi kunci dalam isu PVE, sehingga tidak terdapat disparitas informasi antar aktor dan dapat memberikan gambaran serta batasan yang jelas dalam menangani isu PVE.
- b. Menyediakan laporan berkala yang dapat diakses oleh CSO mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan, program yang telah dijalankan, serta arahan yang diharapkan di masa depan. Hal ini akan dapat memperbaiki kolaborasi antara



pemerintah dan aktor-aktor lain, terutama karena sering kali program-program PVE yang dijalankan memerlukan informasi-informasi penting dari pihak pemerintah.

- c. Membuka akses pendanaan yang berkelanjutan dan informasi mengenai pendanaan kepada CSO.** Pemberitaan mengenai pemberian donor atau pendanaan yang cepat dan tepat sasaran akan lebih membantu para aktor lain dalam merancang dan menjalankan programnya.
  
- d. Mengorganisasikan sebuah forum atau pertemuan terbuka bagi seluruh pembuat kebijakan dan CSO di Indonesia secara berkala.** Apabila forum ini dapat dilaksanakan secara rutin (1-2x per tahun), maka kerja sama, pertukaran informasi, saran, kritik, dan rekomendasi terhadap setiap program PVE yang dilaksanakan di Indonesia juga akan lebih efektif. Hal ini menjadi langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan poin-poin rekomendasi di atas.

## 2. Pihak CSO

- a. Menentukan fokus unggulan dalam menangani isu PVE.** Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan, bahwa para CSO dapat lebih fokus pada isu-isu tertentu, yang menjadi fokus utamanya, sehingga hasil dari program PVE akan lebih kuat.
  
- b. Membuka forum diskusi berkala antar CSO sebagai ruang untuk bertukar dan memutakhirkan informasi mengenai program**

**yang sedang dijalankan, serta ruang berbagi dan belajar.** Hal ini menjadi penting, karena untuk mengatasi tumpang-tindih program yang terjadi antar CSO dan meningkatkan peluang kolaborasi yang lebih efektif dan efisien.

**c. Menginisiasi inovasi database CSO di Indonesia beserta fokus dan program-programnya.** Dengan setiap CSO berkontribusi terhadap *database* ini, maka seluruh CSO akan memiliki informasi mengenai apa yang dilakukan oleh para aktor lain, sehingga memudahkan identifikasi terhadap bidang dan isu mana yang masih perlu untuk mendapat perhatian lebih dan mana yang dapat dikembangkan.

**d. Memperkuat konsep dan teori mengenai PVE karena sensitivitas isu, argumen yang tajam dan koheren sangat dibutuhkan untuk meyakinkan publik dan pemerintah.** Beberapa kritik yang diperoleh CSO adalah tidak adanya landasan teoritis yang kuat dalam menjalankan program serta tidak adanya keberlanjutan dalam program-program yang telah dijalankan, sehingga sumber daya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

### **3. Program PVE Bidang Pendidikan**

**a. Melakukan *joint program* antar-aktor.** Para aktor di bidang Pendidikan perlu mengurangi jumlah kegiatan, namun meningkatkan efektivitas dan efisiensi setiap program yang dijalankan sehingga dampak program akan menjadi lebih kuat.

- b. Mendorong Kemendikbud dan Kemenristekdikti untuk mempermudah izin pelaksanaan program PVE di lembaga-lembaga pendidikan.** Mengingat, bahwa isu radikalisme dan terorisme dinilai sarat muatan politis, sehingga terkadang beberapa lembaga pendidikan sulit untuk diajak bekerjasama, maka pihak pemerintah dapat membantu memudahkan proses perizinan dan kerja sama dengan memberikan rekomendasi terhadap lembaga pendidikan yang menjadi target, untuk melakukan kerja sama dengan para aktor penyelenggara program.

#### **4. Program PVE Bidang Internet dan Media Sosial**

- a. Menyelaraskan kontra–narasi sehingga lebih koheren dan terstruktur.** Hal ini penting untuk memastikan, bahwa *counter* narasi yang dibangun oleh berbagai pihak dapat secara efektif mencegah penyebaran paham kekerasan ekstremisme. Aktor-aktor yang aktif perlu untuk membangun kerja sama, dengan cara duduk bersama dalam penyusunan konten yang kreatif, efektif, serta terukur. Ini juga dapat didukung dengan melakukan evaluasi efektivitas konten melalui berbagai metode, misalnya mengukur peningkatan *traffic* dalam jangka waktu tertentu setelah peluncuran konten.
  
- b. Mengidentifikasi target program dan melakukan pemetaan terhadap kanal-kanal media, yang dapat digunakan untuk mencapai target program tertentu.** Diperlukan narasi yang berbeda-beda untuk setiap kelompok yang berbeda level keterpaparan ideologinya. Oleh sebab itu, perlu untuk

mengidentifikasi kanal media yang tepat dalam menyampaikan narasi yang tepat, secara kuantitas dan kualitas, terhadap setiap kategori target sasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan klasifikasi yang memetakan kanal media dan target sasaran.

- c. Mendorong pemerintah dan lembaga untuk memberikan akses kepada pendanaan yang berkelanjutan.** Program-program di bidang ini melibatkan kebutuhan sumber daya yang besar dari segi teknis, seperti: kapabilitas IT yang tinggi maupun dana untuk menjalankan kebutuhan program, baik *data mining* maupun *machine learning*. Oleh sebab itu, setiap aktor dan pendonor yang terjun di bidang ini juga perlu untuk berkolaborasi supaya dapat menggabungkan sumber daya yang dimiliki, sehingga program dapat kuat dan berkelanjutan.

## 5. Program PVE Bidang Deradikalisasi

- a. Mendorong BNPT untuk mempermudah akses terhadap kelompok-kelompok ekstremis kekerasan dan memberi dukungan keamanan kepada para aktor CSO untuk menjalankan program.** Hal ini penting untuk mengurangi adanya risiko *backlash* dan ketidakselarasan antar program deradikalisasi yang dilakukan oleh beberapa aktor.
- b. Menyusun strategi bersama untuk membuat program-program deradikalisasi yang berkesinambungan dalam jangka panjang.** Program kontra radikalisme pada eks-napiter memerlukan upaya yang sangat tinggi, karena pendampingan

terus-menerus perlu dilakukan agar tidak terjadi *relapse* atau kembalinya eks-napiter ke jalur radikalisme dan ekstremisme. Untuk itu, para aktor perlu memastikan, bahwa setiap program yang dijalankan tidak bersifat intervensi sementara, namun lebih kepada program yang berkelanjutan.

## 6. Program PVE Bidang Kebijakan

- a. **Membuat forum diskusi kebijakan berkala.** Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik dalam taraf nasional maupun internasional, sehingga advokasi menjadi lebih kuat. Salah satu permasalahan yang cukup pelik dalam penanganan isu PVE adalah lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar pihak, sehingga sangat penting untuk melakukan penguatan di bidang kemitraan dan kerja sama.
- b. **Mendorong pemerintah untuk menyusun payung hukum yang memuat seluruh terminologi-terminologi terkait PVE.** Hal ini penting, sebab dapat dijadikan acuan yang jelas dan seragam bagi seluruh aktor untuk menjalankan programnya.

## 7. Program PVE Bidang Ekonomi – Sosiokultural - Politik

- a. **Melakukan identifikasi terhadap faktor penarik seperti kerentanan sosial, politik, dan ekonomi serta faktor pendorong seperti motivasi identitas dan peran kebermaknaan, baik pada masyarakat umum maupun pada kelompok terpapar.**

Para aktor kemudian dapat melakukan penyusunan program-program, dan menyesuaikannya dengan keadaan masing-masing wilayah, berdasarkan faktor penarik dan pendorong yang telah diidentifikasi. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian pendahuluan oleh para aktor maupun akademisi.

## BAB VI

# KETERBATASAN PENELITIAN

Studi ini sudah dapat memetakan implementasi kebijakan pencegahan ekstremisme-kekerasan di Indonesia oleh pemerintah dan masyarakat sipil selama lima tahun terakhir (2015-2019) berdasarkan RAN-PE, dengan menggunakan berbagai sumber data empiris yang representatif. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yang dituliskan di bagian ini, untuk dapat dijadikan catatan kritis dalam membaca hasil penelitian ini.

- a. Pemetaan aktor PVE yang dilakukan dalam penelitian ini masih terbatas hanya pada CSO yang berada di wilayah Jabodetabek, belum mengakomodasi seluruh aktor di kota-kota lain di seluruh wilayah Indonesia, hanya ada satu CSO di Lamongan Jawa Timur yang dimasukkan dalam studi ini. Meskipun demikian, wilayah target yang menjadi sasaran program dari CSO yang dimasukkan dalam studi ini tidak hanya sebatas Jabodetabek saja, tetapi juga di berbagai wilayah lain, beberapa kota di Indonesia.
- b. Pemetaan aktor PVE dari unsur organisasi keagamaan, yang dimasukkan dalam studi ini, masih terbatas pada ormas Islam (NU dan Muhammadiyah), ormas keagamaan dari agama selain Islam belum diakomodasi dalam studi ini.

- c. Identifikasi *gap* dari implementasi kebijakan yang dilakukan dalam studi ini hanya berfokus pada konten/substansi dari program, belum memperhitungkan faktor organisasi dan sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut, baik materiil maupun non materiil.
- d. Analisis dari evaluasi kebijakan implementasi program ekstremisme kekerasan ini belum secara spesifik menggali isu-isu gender dan anak, *foreign terrorism fighter* dan radikalisasi keluarga yang telah menjadi isu penting di era pasca ISIS.
- e. Dokumen RAN PE tahun 2019, yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, merupakan dokumen yang masih belum disahkan secara resmi dan masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan. Namun demikian, dan ini kelebihannya, hasil dari riset ini dapat dijadikan sebagai acuan awal metode pemetaan program, untuk melakukan *updating* dan klasifikasi ulang dalam penelitian lanjutan, ketika dokumen tersebut sudah disahkan secara resmi.

# DAFTAR PUSTAKA

- Behn, R.D. & Vaupel, J.W. (1982). *Quick analysis for busy decision makers*. New York: Basic Books.
- Borum, R. (2003). *Understanding Terrorist Mindset*. *FBI Law Enforcement Bulletin*. 7-10.
- Bouzar, D. and Martin, M. (2016) 'Méthode expérimentale de déradicalisation: Quelles stratégies émotionnelles et cognitives?', 158, pp. 83-96.
- Jones, S. et al. (2017) *Rolling Back the Islamic State, Rolling Back the Islamic State*. RAND Cooperation Report. doi: 10.7249/rr1912.
- Kruglanski, A.W & Orehek, E. (2012). *The Need for Certainty as a Psychological Nexus for Individuals and Society*. In "From Uncertainty to Extremism". Michael A. Hogg & Danielle L. B. (Ed.). *The Claremont Symposium on Applied Social Psychology*. pp. 3-18.
- Kruglanski, A. W., Webber, D., Jasko, K., Chernikova, M & Molinario, E., (2018) 'The making of violent extremists', *Review of General Psychology*, 22(1), pp. 107-120. doi: 10.1037/gpr0000144.
- Milla, N.M. & Umam, A.N. (2019). *Understanding Intergroup Contact on Terrorist Prisoners in Indonesia*. In *Learning from Violent Extremist Attacks: Behavioural Sciences Insights for*

*Practitioners and Policymakers. Majeed Khader, Neo Loo Seng, Jethro Tan D.D. Cheog & Jeffrey Chin (Ed.). pp. 259-278. Singapore: World Scientific.*

*Milla, M. N., Putra, I. E. & Umam, A. N. (2019) 'Stories from jihadists: Significance, identity, and radicalization through the call for jihad.', Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 25(2), pp. 111-121. doi: 10.1037/pac0000371.*

*Milla, M. N., Hudiyana, J., Cahyono, W & Muluk, H. (2020) 'Is the Role of Ideologists Central in Terrorist Networks? A Social Network Analysis of Indonesian Terrorist Groups', Frontiers in Psychology, 11 (March). doi: 10.3389/fpsyg.2020.00333.*

*Putra I.E., Erikha F., Arimbi R.S., Rufaeda A. Increasing integrative complexity on convicted terrorists in Indonesia. Sotsial'naia psikhologiya i obshchestvo [Social Psychology and Society], 2018. Vol. 9, no. 2, pp. 35-45. doi:10.17759/sps.2018090203 (In Russ., bstr. in Engl.).*

*Silber, M. & Bhatt, A. (2007) 'Radicalization in the West: The Homegrown Threat'. New York, NY: New York City Police Department. 68. ISBN: 978-0-9819-7121-6.2.*

# Glossary

RAN PE	: Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme.
PVE	: Preventing violent extremism.
Kontra-radikalisme	: Upaya mengubah ideologi dengan menurunkan level ekstremisme ke arah moderat.
Counter-narrative	: Narasi kontra-radikalisme.
CSO	: Civil society organization.
Program sinergisitas	: Program pencegahan radikalisme terorisme sinergisitas 36 kementerian lembaga di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
ISIS	: Negara Islam di Irak dan Syam (Suriah).
Ekstremisme kekerasan	: Paham yang mengarah pada polar orientasi ideologi tertentu dan menjustifikasi penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya.
Radikalisme	: Paham yang mendorong pencapaian tujuan politik akan perlunya perubahan yang medasar dari dari suatu sistem yang ada.
Terorisme	: Paham yang menjustifikasi penggunaan kekerasan melalui intimidasi public dengan strategi teror untuk mencapai tujuan politik.
ELSAM	: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
AIDA	: Aliansi Indonesia Damai.
AMAN Indonesia	: <i>The Asian Muslim Action Network Indonesia.</i>
C-Save	: <i>Civil Society Against Violent Extremism.</i>

CRCS Yogyakarta	: <i>Center for the Study or Religion and Culture.</i>
DASPR	: <i>Division for Applied Social Psychology Research.</i>
ICIP	: <i>Indonesian Center for Islam and Pluralism.</i>
ICRP	: <i>Indonesian Conference on Religion and Peace.</i>
IMCC	: <i>Indonesia Muslim Crisis Center.</i>
IPAC	: <i>Institute for Policy Analysis of Conflict.</i>
Imparsial	: Sebuah LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran HAM di Indonesia.
IMVIRE	: <i>Institute for Masculinities, Violence and Religions.</i>
PPIM UIN Jakarta	: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat.
PROTECT (UNDP)	: <i>Preventing Violent Extremism Through Promoting Tolerance and Respect for Diversity.</i>
UNDP	: <i>The United Nations Development Programme.</i>
UNODC	: <i>The United Nations Office on Drugs and Crime.</i>
UN Women	: <i>The United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women.</i>
WGWG	: <i>Working Group on Women and P/CVE.</i>







NGO in Special Consultative Status  
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

---

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540  
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

**Follow Us:**

